

**EVALUASI PENERAPAN STRATEGI MITIGASI
RISIKO SELISIH SALDO PADA SISTEM SIPD DI
BKAD KABUPATEN KULON PROGO**



**Disusun Oleh
Najla Uzdah Asmahani
21213018**

**PROGRAM STUDI ANALISIS KEUANGAN,
PROGRAM SARJANA TERAPAN
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA,
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MEI, 2025**

**EVALUASI PENERAPAN STRATEGI MITIGASI
RISIKO SELISIH SALDO PADA SISTEM SIPD DI
BKAD KABUPATEN KULON PROGO**



ACC sidang
26/5 25

Adim
Annisa Rahima

Disusun Oleh
Najla Uzdah Asmahani
21213018

**PROGRAM STUDI ANALISIS KEUANGAN,
PROGRAM SARJANA TERAPAN
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA,
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MEI, 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa dengan sesungguhnya-sungguhnya Skripsi dengan judul Evaluasi Penerapan Strategi Mitigasi Risiko Selisih Saldo Pada Sistem SIPD di BKAD Kabupaten Kulon Progo yang disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan untuk menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, sejauh saya ketahui bukan merupakan suatu tiruan atau duplikasi dari Skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau sudah pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan di lingkungan Universitas Islam Indonesia maupun di Perguruan Tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.



Yogyakarta 26 Mei 2025

Najla Uzdah Asmahani

21213018

HALAMAN PERSETUJUAN

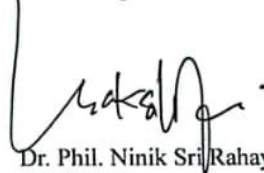
Skripsi dengan judul Evaluasi Penerapan Strategi Mitigasi Risiko Selisih Saldo Pada Sistem SIPD di BKAD Kabupaten Kulon Progo disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, dan disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian Skripsi.

Yogyakarta,
Pembimbing



Annisa Rahima, S.E., M.Ec., Dev.
182131302

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, S.E., MM.
052130103

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Evaluasi Strategi Mitigasi Risiko Selisih Saldo Pada Sistem SIPD di BKAD Kabupaten Kulon Progo", telah dipertahankan dalam ujian wawancara dan diterima sebagai syarat untuk menjadi Sarjana Terapan Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, pada tanggal 8 Agustus 2025.

Tim Penguji

Penguji I,



Annisa Rahima, S.E., M.Ec., Dev.
182131302

Penguji II,



Dr. Nur Ellyanawati Esty Rahayu, S.E., MM.
162131301



Mengesahkan,
Ketua Program Studi

Dr. Pdt. Ninik Sri Rahayu, S.E., MM.
052130103

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillahirabbil'alamin, Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dengan penuh rasa syukur yang tulus dan mendalam, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dan mempersembahkannya kepada:

Orang Tua Tersayang

Untuk kedua orang tua tersayang Ayah Ahmad Setiyono dan Ibu Rita Setyaningsih, terima kasih atas doa yang senantiasa mengiringi langkah kecil penulis, dukungan yang tak pernah surut, serta cinta dan pengorbanan yang tidak bisa dinilai oleh materi. Dalam setiap langkah dan capaian penulis, ada kekuatan dari restu dan perjuangan kalian yang tak pernah lelah mendampingi langkah putrinya. Terima kasih juga telah memberikan ruang dan kebebasan bagi anak perempuan kalian ini untuk selalu bermimpi, bereksplorasi serta tumbuh menjadi anak perempuan yang mandiri. Semoga skripsi ini menjadi secuil bukti dan awal dari terwujudnya berbagai harapan yang telah kalian semai dalam doa-doa yang tak pernah henti.

Kedua adikku

Agam Nanda Permana dan Muhammad Jidan Mustaqmal, terima kasih telah menjadi sumber semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan menghadirkan tawa di tengah kelelahan. Semoga langkah kalian kedepannya selalu dipenuhi semangat dan keberanian sebagai dua jagoan hebat kebanggaan keluarga kita.

Sahabat-sahabat

Yohana Metsa Stefani, Dea Maharani Aginingtias, meski saat ini kita sudah berjalan melalui jalur yang berbeda tetapi terimakasih atas dukungan, doa, dan kebersamaan yang selalu menjadi penawar lelahku. Serta untuk Lafziah Haqul Zain, Putri Rahmawati, dan Nurma Niskafatun Kasanah yang telah menjadi sahabat setia dari awal hingga akhir perkuliahan. Terima kasih atas segala tawa yang tercipta selama empat tahun itu, semangat, dan kebersamaan yang selalu menguatkan langkah menuju akhir perkuliahan ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil'Alamin, Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang mengangkat judul **"Evaluasi Penerapan Strategi Mitigasi Risiko Selisih Saldo pada SIPD di BKAD Kabupaten Kulon Progo"**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana Terapan Analisis Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia dengan tepat waktu.

Dalam penulisan Laporan ini tidak terlepas dari bantuan yang berasal dari berbagai pihak baik berupa nasihat, kritik, saran, dorongan semangat untuk menyelesaikan laporan ini dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis, khususnya kepada :

1. Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan ridho-Nya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
2. Bapak Ahmad Setiyono dan Ibu Rita Setyaningsih selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan secara moral dan materi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Agam Nanda Permana dan Muhammad Jidan Mustaqmal selaku kedua adik penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan semangat dan doa kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Annisa Rahima, SE., M.Ec. Dev., selaku Dosen Pembimbing terima kasih atas waktu, semangat, serta arahan yang Ibu berikan dalam proses penulisan skripsi ini.

6. Ibu Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, SE., MM selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Analisis Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Analisis Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, bimbingan serta pengalaman yang berharga selama masa perkuliahan.
8. Seluruh teman-teman Program Studi Analisis Keuangan angkatan 2021 yang telah memberikan pengalaman serta kenangan berharga dan mewarnai perjalanan selama masa perkuliahan.
9. Seluruh sahabat dan teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan dan doa yang senantiasa mengiringi penulis selama proses penulisan skripsi ini.
10. Terakhir, Najla Uzdah Asmahani, ya ! diri saya sendiri. Terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah berhasil menyelesaikan apa yang telah dimulai sejak September 2021. Maaf atas segala bentuk pemaksaan yang pernah dilakukan, memaksa tetap kuat di tengah keadaan yang berat dan melelahkan. Namun terima kasih, karena tetap memilih bertahan, selalu melangkah, dan merayakan diri sendiri meskipun jauh dari kata sempurna. Kamu hebat telah melalui semuanya sejauh ini dengan keberanian yang tak selalu terlihat, tapi nyata. ***You did well, and I'm truly proud of you! This is not the end of the journey, but the beginning of a new chapter yet to unfold !!***

Penulis menyadari masih adanya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Terima kasih atas dukungan secara materi maupun moral, semangat, dan masukan saran yang telah diberikan.

Yogyakarta, Juni 2025



Najla Uzdah Asmahani

”Evaluasi Penerapan Strategi Mitigasi Risiko Selisih Saldo Pada Sistem SIPD Di BKAD Kabupaten Kulon Progo”

Abstrak

Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada pemerintahan daerah untuk menyusun laporan keuangan masih menghadapi berbagai hambatan dan risiko. Pada Januari 2025, ditemukan adanya selisih saldo antara LPJ Bendahara Penerimaan dengan LRA Bidang Akuntansi di BKAD Kabupaten Kulon Progo. Kondisi ini berdampak pada penurunan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, sehingga diperlukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai identifikasi penyebab selisih saldo serta evaluasi efektivitas penerapan strategi mitigasi risiko terhadap permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya selisih saldo dan mengevaluasi strategi mitigasi risiko yang telah diterapkan di BKAD Kabupaten Kulon Progo. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara personal dengan enam pegawai yang terlibat langsung dalam penggunaan SIPD serta satu orang mahasiswa magang di Subbagian Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor utama penyebab selisih saldo, antara lain kurangnya pemahaman pegawai terhadap SIPD, kurang cermatnya pegawai dalam memproses data, serta lemahnya komunikasi antar pegawai. Strategi mitigasi risiko yang telah diterapkan berupa rekonsiliasi data dan pemantauan rutin yang dilakukan oleh Kepala BKAD Kabupaten Kulon Progo dinilai cukup efektif. Namun, dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pada bagian bendahara penerimaan serta belum optimalnya koordinasi antar pegawai.

Kata Kunci: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), BKAD Kabupaten Kulon Progo, Faktor Penyebab Selisih Saldo, Upaya Mitigasi Risiko

"Evaluation of the Implementation of Balance Difference Risk Mitigation Strategy in the SIPD System at BKAD Kulon Progo Regency"

Abstract

The use of the Regional Government Information System (SIPD) in local governments to prepare financial reports still faces various obstacles and risks. In January 2025, it was found that there was a difference in the balance between the LPJ Treasurer of Revenue and the LRA for Accounting at the BKAD of Kulon Progo Regency. This condition has an impact on the quality of the financial statements produced, so it is necessary to conduct further research on the identification of the causes of the balance difference and evaluate the effectiveness of the implementation of risk mitigation strategies for these problems. This study aims to find out the factors that cause the balance difference and evaluate the risk mitigation strategies that have been implemented in the BKAD of Kulon Progo Regency. The method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through personal interviews with six employees who are directly involved in the use of SIPD and one intern student at the Finance Subdivision of the Regional Finance and Assets Agency (BKAD) of Kulon Progo Regency. The results of the study show that there are three main factors that cause the balance difference, including the lack of understanding of employees about SIPD, the lack of careful communication between employees, and weak communication between employees. The risk mitigation strategy that has been implemented in the form of data reconciliation and routine monitoring carried out by the Head of BKAD Kulon Progo Regency is considered quite effective. However, in its implementation, it still faces obstacles such as limited Human Resources (HR) in the revenue treasurer and suboptimal coordination between employees.

Keywords: Local Government Information System (SIPD), BKAD Kulon Progo Regency, Factors Causing Balance Differences, Risk Mitigation Efforts

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Manfaat.....	3
1.4.1 Manfaat Akademik.....	3
1.4.2 Manfaat Bagi Instansi	3
BAB II.....	4
KAJIAN PUSTAKA	4
2.1 Landasan Teori	4
2.1.1 Laporan Keuangan Daerah	4
2.1.2 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	5
2.1.3 Jenis-Jenis Risiko pada Keuangan	5
2.1.4 Risiko Operasional.....	6
2.1.5 Risiko Reputasi.....	6
2.1.6 Risiko Fraud.....	7
2.1.7 Manajemen Risiko	8
2.1.8 Urgensi Mitigasi Risiko pada Pemerintah Daerah.....	8
2.2 Penelitian Terdahulu	9
BAB III	13

METODE PENELITIAN	13
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	13
3.2 Desain Penelitian	13
3.3 Sumber Data dan Sampel Penelitian	14
3.4 Teknik Pegumpulan Data	15
3.5 Teknik Keabsahan Data.....	16
3.6 Teknik Analisis Data	18
BAB IV	20
HASIL DAN PEMBAHASAN	20
4.1 Gambaran Umum BKAD Kabupaten Kulon Progo.....	20
4.1.1 Sejarah BKAD Kabupaten Kulon Progo	20
4.1.2 Tugas dan Fungsi BKAD Kabupaten Kulon Progo	20
4.1.3 Struktur dan Tata Kelola BKAD Kabupaten Kulon Progo	22
4.2 Hasil dan Pembahasan.....	26
4.2.1 Penyebab Selisih Saldo Dalam SIPD Pada Laporan Keuangan BKAD Kabupaten Kulon Progo.....	26
4.2.2 Proses Manajemen Risiko dan Evaluasi Penerapan Mitigasi Risiko pada BKAD Kabupaten Kulon Progo.....	34
BAB V	38
KESIMPULAN	38
5.1 Kesimpulan.....	38
5.2 Implikasi	39
5.2.1 Implikasi Teoritis	39
5.2.2 Implikasi Praktik.....	39
5.3 Keterbatasan	40
5.4 Rekomendasi Penelitian Selanjutnya	41
DAFTAR ISI	42
DAFTAR LAMPIRAN	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 3. 1 Daftar Sampel Wawancara	14
Tabel 4. 1 Perbandingan LPJ dan LRA di SIPD	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Triagulasi teknik pengumpulan data penelitian.....	17
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BKAD Kabupaten Kulon Progo	22

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Instrumen Penelitian.....	46
LAMPIRAN 2 : Surat Keterangan Riset/Magang	60
LAMPIRAN 3 : Daftar Riwayat Hidup	61
LAMPIRAN 4 : Surat Keterangan Hasil Pindai Uji Kemiripan Naskah	62
LAMPIRAN 5 : Dokumentasi Kegiatan Wawancara dan Dokumen B9	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan setiap akhir Tahun Anggaran (TA), sesuai dengan UU No.17 Tahun 2003 dan PP No. 58 Tahun 2005. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan diharapkan dapat disusun dengan jelas, mudah dipahami, disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAK) serta bersifat informatif bagi seluruh pengguna Laporan Keuangan. Dalam proses penyusunan laporan keuangan, pemerintah daerah tidak terlepas dari potensi ketidakpastian yang berasal dari aktivitas organisasi sehingga berdampak terhadap mutu laporan keuangan yang dihasilkan. (Andi Kusnadi et al., 2022). Penerapan Manajemen Risiko diperlukan pemerintah daerah untuk melakukan identifikasi masalah, menganalisis masalah, merumuskan strategi mitigasi risiko serta melakukan evaluasi secara berkala mengenai strategi mitigasi risiko yang diterapkan (Muhammad Asir et al., 2023).

Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan instansi pemerintahan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola keuangan daerah dan aset dari suatu daerah (Fitriyani et al., 2024). Pada Tahun 2020, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai mengembangkan sistem yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam proses perencanaan, penganggaran, serta pengawasan terhadap keuangan daerah. Selain itu, sistem ini berfungsi untuk menyusun laporan keuangan daerah yang dapat diakses oleh masyarakat. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) merupakan salah satu instansi yang memanfaatkan sistem tersebut untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam proses pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah serta realisasi keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memberikan manfaat bagi instansi pemerintahan untuk mendukung operasional kegiatannya sehingga SIPD memiliki potensi besar untuk membantu instansi pemerintahan di masa mendatang (Naconha, 2021).

Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), ditemukan adanya risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintahan.

Risiko yang muncul merupakan suatu bentuk ketidakpastian dari suatu proses yang bertujuan untuk mencapai target atau tujuan instansi (Kumalasari & Fanida, 2024). Dalam penyusunan laporan keuangan daerah yang akan dilaporkan kepada masyarakat, terdapat proses administrasi penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah. Proses ini menghasilkan Laporan Pertanggungjawaban yang berkaitan dengan Laporan yang akan dibuat oleh Bidang Akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang komprehensif. Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo, ditemukan selisih saldo pada Januari 2025 antara Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disusun oleh Petugas Akuntansi sebesar Rp2.192.733. Hal tersebut menyebabkan BKAD Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi risiko operasional, risiko reputasi, serta risiko *fraud* dalam pelaporan keuangan kepada masyarakat. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya selisih saldo pada SIPD serta upaya peningkatan mitigasi risiko dalam mengatasi potensi risiko yang ada. Penelitian ini akan dirumuskan dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Evaluasi Penerapan Strategi Mitigasi Risiko Selisih Saldo Pada Sistem SIPD Di BKAD Kabupaten Kulon Progo"**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja yang menyebabkan terjadinya selisih saldo dalam pelaporan keuangan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ?
2. Bagaimana penerapan mitigasi risiko pada permasalahan selisih saldo antara bendahara dan petugas akuntansi di BKAD Kabupaten Kulon Progo ?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian secara umum yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya selisih saldo dalam pelaporan keuangan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
2. Untuk mengevaluasi penerapan mitigasi risiko terhadap selisih saldo pada laporan keuangan di BKAD Kabupaten Kulon Progo

1.4 Manfaat

Melalui penyusunan skripsi terapan ini, diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademik

Manfaat Penelitian terapan secara akademik memberikan kontribusi yang nyata pada pengembangan kurikulum pembelajaran, khususnya manajemen risiko pada lingkungan pemerintahan. Selain itu, penelitian ini turut memperkaya pengetahuan akademis mengenai tata kelola pemerintahan serta mendukung pengembangan kebijakan di lingkungan akademik. Meskipun penelitian mengenai manajemen risiko telah banyak dilakukan, fokus dari penelitian ini berfokus pada permasalahan yang muncul dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sistem ini merupakan sistem baru yang digunakan pada lingkungan pemerintahan. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko pada permasalahan selisih saldo pada lingkungan pemerintahan lainnya.

1.4.2 Manfaat Bagi Instansi

Penelitian Terapan ini diharapkan dapat menjadi acuan atau pertimbangan bagi instansi pemerintahan yang bersangkutan guna meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat dan efektivitas kinerja instansi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan solusi untuk mengembangkan kebijakan bagi para pegawai serta menjadi bahan evaluasi penerapan mitigasi risiko atas permasalahan selisih saldo laporan keuangan yang dihasilkan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Laporan Keuangan Daerah

Akuntabilitas dari sektor publik atau pemerintahan tercermin melalui laporan keuangan daerah yang disusun oleh instansi pemerintah. Laporan ini menjadi acuan bagi pihak yang memiliki kepentingan untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan menyusun kebijakan. Selain berfungsi sebagai alat pengawasan transparansi, laporan keuangan daerah mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga akan terwujud *good governance*. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan Daerah disusun untuk menunjukkan posisi keuangan dan aktivitas keuangan selama satu periode Tahun Anggaran (TA) (Pamungkas et al., 2023).

Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dan Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan Daerah terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menyajikan informasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), menunjukan perubahan sisa anggaran dari tahun sebelumnya.
3. Neraca, menggambarkan aset, kewajiban, serta ekuitas pemerintah daerah.
4. Laporan Operasional (LO), berisi informasi kinerja operasional, seperti pendapatan dan beban berbasis akrual.
5. Laporan Arus Kas (LAK), menunjukan aliran kas masuk dan keluar berdasarkan aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), menjelaskan perubahan posisi ekuitas selama periode berjalan.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), memberikan penjelasan tambahan atas pos-pos laporan serta informasi penting lainnya.

Keseluruhan komponen laporan ini menjadi dasar untuk menilai kondisi keuangan daerah dan penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Yalabi, 2021).

2.1.2 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Seiring dengan kemajuan teknologi, pemerintah mulai melakukan pengembangan sistem yang diperuntukan bagi pemerintah daerah. Sistem ini dikenal dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sistem ini merupakan sistem yang dikembangkan oleh Kemendagri untuk mengelola, mendokumentasikan, serta menyajikan laporan keuangan daerah. Sistem ini dikembangkan oleh Kemendagri untuk menggantikan sistem sebelumnya, yaitu SIMDA. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 (Alfani & Nasution, 2022).

SIPD mulai digunakan secara nasional semenjak tahun 2020, dan saat ini hampir seluruh pemerintahan daerah menggunakan sistem tersebut untuk proses perencanaan hingga pelaporan keuangan daerah. Sistem ini terus dikembangkan dan disempurnakan oleh Kemendagri agar lebih akurat dan *user friendly*. Meskipun Kemendagri terus berupaya menyempurnakan sistem, potensi risiko tetap ada dan menyebabkan laporan yang dihasilkan tidak akurat (Wulandari & Yuliati, 2023).

2.1.3 Jenis-Jenis Risiko pada Keuangan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengelompokkan risiko yang ada pada sektor keuangan ke dalam tujuh kategori risiko, antara lain:

1. Keuangan dan Aset Negara, risiko ini mencakup risiko dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat, termasuk kebijakan fiskal, perpajakan, perbendaharaan, serta pengelolaan aset seperti Barang Milik Negara (BMN) dan Investasi Pemerintah.
2. Kebijakan, risiko ini terkait dengan potensi risiko dalam penyusunan dan penerapan kebijakan internal maupun eksternal.
3. Reputasi, risiko ini berkaitan dengan penurunan kepercayaan publik akibat persepsi negatif terhadap instansi.
4. *Fraud*, risiko ini mencakup tindakan penipuan, penggelapan, atau penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi atau pihak lain.
5. Legal, risiko yang timbul dari tuntutan hukum akibat pelanggaran hak atau kerugian terhadap pihak lain.

6. Kepatuhan, risiko yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap regulasi nasional, internasional, atau ketentuan lain yang berlaku.
7. Operasional, risiko yang mencakup gangguan terhadap proses bisnis, sistem informasi, atau keselamatan kerja (Riani & Jumhur, 2020)

2.1.4 Risiko Operasional

Risiko Operasional merupakan salah satu risiko yang muncul sebagai akibat dari kegagalan atau ketidaksempurnaan yang terjadi pada internal instansi, kesalahan manusia (*human error*), gangguan sistem yang terjadi serta faktor eksternal yang dapat memberikan dampak kelancaran dan kelangsungan suatu instansi. Dampak dari risiko ini dapat menyebabkan berbagai permasalahan yang timbul dalam suatu instansi, seperti ketidaksesuaian saldo dan kesalahan pencatatan (Harisdayanti et al., 2020). Risiko ini dapat terjadi karena beberapa hal yang menjadi penyebabnya, antara lain : Pertama, mengabaikan pekerjaan yang diberikan sehingga pegawai meremehkan pekerjaan yang diberikan. Kedua, pegawai mengalami kelelahan dalam bekerja sehingga pekerja kurang fokus dalam melakukan kewajiban pekerjaannya. Ketiga, minimnya pelatihan kepada pegawai untuk mengoperasikan sistem yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Keempat, tumpukan pekerjaan yang banyak sehingga pegawai terburu-buru dalam menyelesaikan tugasnya karena waktu yang mepet *deadline*. Kelima, gangguan yang berasal dari luar pekerjaan, seperti adanya masalah keluarga yang mengganggu pikiran pegawai. Terakhir, gangguan yang berasal dari eksternal instansi, seperti ancaman siber sebagai akibat dari berkembangnya teknologi yang semakin canggih (Alwie et al., 2020).

2.1.5 Risiko Reputasi

Kepercayaan publik merupakan aset berharga bagi suatu instansi atau organisasi dalam menjaga kredibilitas dan citra positif. Dalam lingkungan pemerintahan, reputasi yang baik berperan penting dalam membangun hubungan harmonis antara pemerintah dengan masyarakat sehingga tercipta kelancaran dalam pelaksanaan kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah. Risiko reputasi merupakan risiko yang muncul akibat peristiwa atau tindakan yang merusak citra dan

kepercayaan publik terhadap pemerintah. Risiko ini dipengaruhi oleh faktor internal organisasi maupun eksternal, dampak dari risiko ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap persepsi masyarakat kepada pemerintah. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, risiko reputasi dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti : Pertama, Kesalahan dalam pengelolaan informasi yang memicu kesalahpahaman pada masyarakat. Kedua, ketidaksesuaian kebijakan dengan harapan publik yang menimbulkan ketidakpuasan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketiga, kegagalan pemerintah dalam menangani isu sensitif atau krisis yang beredar di masyarakat. Keempat, adanya penyebaran informasi negatif melalui media massa atau media sosial. Terakhir, keterlibatan pejabat dalam tindakan tidak etis atau melanggar hukum dapat semakin merusak citra instansi pemerintah (Kuncoro, 2021).

2.1.6 Risiko *Fraud*

Risiko yang terkait dengan kecurangan atau lebih dikenal dengan istilah *fraud* adalah jenis risiko yang masih sering terjadi di kalangan masyarakat umum. *Fraud* merupakan suatu tindakan curang yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk memperoleh keuntungan dengan menyajikan informasi atau keadaan yang menyimpang dari fakta yang sebenarnya. Tindakan ini biasanya mengandung unsur kejutan, penipuan, kelicikan, serta ketidak jujuran yang berakibat merugikan pihak lain. Tujuan dari *fraud* adalah menimbulkan kesalahan dalam penilaian atau mempertahankan penilaian keliru guna meyakinkan seseorang agar menyetujui suatu kontrak perjanjian. Tindakan ini dilakukan dengan sengaja agar memperoleh keuntungan pribadi, salah satu cara menyembunyikan informasi penting yang dapat menurunkan nilai suatu aset. *Fraud* sering dipicu oleh tiga faktor utama penyebab terjadinya, yaitu: tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*). Tekanan muncul ketika seseorang menghadapi kebutuhan finansial mendesak, sehingga mendahulukan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan organisasi dan mendorongnya melakukan penggelapan dana. Peluang terjadi ketika individu memiliki akses terhadap aset atau kekuasaan dalam sistem pengendalian, yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Sementara itu, rasionalisasi adalah proses pembenaran yang dilakukan pelaku untuk mengangap

tindakannya bukan sebagai kecurangan, melainkan sebagai sesuatu yang dapat dimaklumi. Semakin lambat upaya penanganan, semakin besar peluang pelaku untuk menyembunyikan tindakannya dengan kecurangan tambahan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pencegahan yang tepat guna meminimalkan risiko dan kerugian akibat praktik *fraud* sejak dini (Sudarmanto Eko, 2020).

2.1.7 Manajemen Risiko

Setiap aktivitas organisasi atau instansi memiliki berbagai potensi risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi organisasi. Risiko ini dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal organisasi. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak negatif tersebut, diperlukan penerapan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis yang mencakup identifikasi, penilaian, pengendalian, dan pemantauan risiko guna mendukung pencapaian tujuan organisasi serta mengantisipasi ketidakpastian (Analkhis, 2021).

Dalam proses manajemen risiko terdapat tiga tahapan mitigasi risiko. Tahapan dalam mitigasi risiko meliputi:

1. Identifikasi Risiko: Tahapan ini dilakukan secara berkala untuk mengenali potensi risiko dari suatu aktivitas atau kegiatan tertentu dan mencari sumber risiko berada.
2. Penilaian Risiko: Setelah risiko telah teridentifikasi, risiko dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahannya. Tingkatan risiko terdiri dari tiga, antara lain: risiko tingkat tinggi, risiko tingkat menengah, dan risiko tingkat tinggi.
3. Pengelolaan Risiko: Proses terakhir dalam tahapan ini adalah pengelolaan risiko. Proses ini melibatkan upaya pencegahan dan mitigasi agar kegiatan organisasi tetap berjalan lancar (As Sajjad et al., 2020).

2.1.8 Urgensi Mitigasi Risiko pada Pemerintah Daerah

Penerapan mitigasi pada suatu organisasi atau instansi merupakan langkah strategis jangka panjang yang krusial bagi organisasi atau instansi. Mitigasi risiko bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional suatu organisasi atau instansi. Dengan proses perencanaan hingga pelaksanaan strategi mitigasi yang

efektif, risiko potensial dari suatu kegiatan atau aktivitas dapat diidentifikasi serta diminimalisir semenjak dini. Dalam pemerintahan daerah, proses mitigasi risiko memiliki peranan penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Beberapa urgensi penerapan mitigasi risiko di lingkungan pemerintahan daerah, antara lain:

1. Kepatuhan terhadap regulasi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.60 Tahun 2008, disebutkan bahwa setiap pimpinan dari instansi pemerintahan diberikan kewajiban untuk melakukan penilaian risiko sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP). Selain menandakan integritas suatu instansi, kepatuhan ini menjamin seluruh proses kegiatan operasional dari suatu instansi pemerintahan sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Pencegahan Kegagalan Program Pemerintah

Mitigasi risiko merupakan langkah *preventif* yang dilakukan untuk mendeteksi potensi risiko atau gangguan terhadap kelancaran pelaksanaan program pemerintah. Melalui pengelolaan risiko yang baik, pemerintah daerah mampu mencegah kerugian finansial serta menjamin kualitas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Proses identifikasi risiko secara menyeluruh membantu menghindari potensi risiko keterlambatan dalam pencapaian suatu target.

3. Meningkatkan Kepercayaan Publik

Komitmen dari pemerintah daerah untuk mengelola risiko secara transparan dan sistematis akan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. Upaya ini merupakan cerminan dari tanggung jawab dan keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta mencegah potensi risiko di masa depan (Ahmad, 2019).

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada pembahasan ini, akan dibahas lima penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian terdahulu memiliki peranan penting sebagai acuan dan pembeda antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan teoritis dan membantu mengidentifikasi kekurangan

dalam literatur yang ada. Kelima Penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Temuan Penting
1	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Di Kabupaten Tanah Tumbu Provinsi Kalimantan Selatan (Yusri, 2020).	Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kualitas Laporan Keuangan Daerah melalui SIPD serta menganalisis upaya pemerintah daerah menangani risiko yang muncul.	Kualitatif Deskriptif	Penggunaan SIPD untuk penyusunan Laporan Keuangan Daerah masih menghadapi permasalahan, baik dari internal maupun eksternal yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Tumbu menerapkan Mitigasi Risiko secara terarah dan berkelanjutan.
2	Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru (Vitriana et al., 2022).	Untuk mengetahui Implementasi penggunaan SIPD di Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi risiko-risiko yang berpotensi dalam penerapan sistem SIPD.	Kualitatif Deskriptif	SIPD di Pemerintah Daerah Pekanbaru terkendala oleh keterbatasan SDM, yang dapat mengganggu efektivitas penyusunan Laporan Keuangan Daerah. Untuk itu, diperlukan mitigasi risiko berupa kebijakan bagi pegawai.
3	Analisis Manajemen Risiko pada Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Menggunakan IEC/ISO 3010:2019 (Sine & Maria, 2022).	Untuk menganalisis risiko dari penggunaan SIPD dan mengevaluasi efektivitas manajemen risiko dari pemerintah daerah	Kualitatif	Penggunaan SIPD memiliki 17 potensi risiko, seperti: penyalahgunaan akun, kesalahan penginputan harga, kegagalan transaksi, serta rendahnya pemahaman pegawai terhadap sistem. Risiko-risiko tersebut

					berdampak pada kualitas laporan seperti RKPD dan Renja. Namun, hingga saat ini Diskominfo Kabupaten Rote Ndao belum melaksanakan analisis manajemen secara mendalam untuk mengatasi permasalahan yang ada.
4	Manajemen Aplikasi SIPD di Inspektorat Provinsi Riau Dalam Perpektif George R. Terry (Kelana, 2024).	Bagaimana Manajemen aplikasi SIPD dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Riau.	Kualitatif Deskriptif		Fungsi manajemen risiko pada SIPD sebagai kerangka kerja yang efektif dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik.
5	Efektivitas Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur (Pradipta, 2023)	Mengevaluasi efektivitas penyusunan RKA pada SIPD, mengidentifikasi faktor penghambat, serta upaya manajemen risiko pemerintah Kabupaten Madiun dalam mengatasinya.	Kualitatif Deskriptif		Hambatan yang dihadapi meliputi koordinasi yang lemah, keterbatasan SDM, gangguan jaringan serta kesulitan berkomunikasi dengan Kemendagri. Upaya manajemen risiko yang dilakukan oleh pemerintah Madiun antara lain: peningkatan koordinasi, perbaikan kapasitas jaringan, serta peningkatan SDM.

Sumber: Diolah penulis, 2025

Berdasarkan lima penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan di atas, persamaan penelitian ini terletak pada adanya potensi risiko pada penggunaan SIPD oleh pemerintah daerah dan dampak dari risiko terhadap Laporan Keuangan Daerah. Adapun perbedaanya, penelitian ini difokuskan pada identifikasi faktor-faktor penyebab permasalahan selisih saldo pada Laporan Keuangan melalui SIPD, serta

mengevaluasi penerapan mitigasi risiko terhadap permasalahan selisih saldo pada Laporan Keuangan di BKAD Kab. Kulon Progo.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo yang beralamat di Jl. Perwakilan Nomor 1, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Nomor telepon (0274) 773221. Penelitian dilaksanakan selama enam bulan, terhitung dari tanggal 9 September 2024 sampai 21 Februari 2025.

3.2 Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif merupakan salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena yang terjadi, perilaku individu, serta peristiwa yang terjadi secara mendalam dan terperinci. Pendekatan dari kualitatif deskriptif tidak berfokus pada pengukuran secara kuantitatif, melainkan melalui pendekatan induktif yang menekankan pada pemahaman secara mendalam dan bermakna terhadap konteks serta kualitas dari objek yang diteliti (Yusanto, 2020).

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mengungkap kondisi nyata yang terjadi di lapangan secara terbuka, rinci, dan mendalam. Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi langsung (*terjun langsung*) di BKAD Kabupaten Kulon Progo, melalui pengumpulan data yang diperlukan untuk mengetahui upaya mitigasi risiko yang telah dilakukan serta faktor penyebab terjadinya risiko selisih saldo. Penelitian dilaksanakan dengan berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian guna memperoleh informasi yang akurat dan relevan. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terkait dengan suatu peristiwa guna mengungkap dan memperjelas masalah yang terjadi.

3.3 Sumber Data dan Sampel Penelitian

Sumber data dalam penelitian yaitu tempat yang digunakan untuk memperoleh informasi maupun data yang diperlukan untuk menyempurnakan analisis penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber internal perusahaan melalui keterlibatan langsung di Lokasi penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data primer meliputi observasi melalui pengamatan langsung serta wawancara mendalam kepada sampel penelitian (Siregar et al., 2022). Dalam penelitian kualitatif, sampel disebut dengan informan, narasumber, partisipan atau pemilik informasi serta berperan aktif dalam memberikan data penelitian. Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap sumber-sumber yang sudah ditentukan (Adil, 2023). Dalam penelitian ini, sampel ditentukan melalui teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria dan pertimbangan. Sampel penelitian ini terdiri dari pegawai yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Adapun daftar sampel wawancara dapat dilihat pada rincian berikut:

Tabel 3. 1 Daftar Sampel Wawancara

Target	Jumlah	Topik Wawancara
Kepala BKAD Kabupaten Kulon Progo	1	• Bagaimana cara kerja yang dilakukan pegawai dalam melakukan pemrosesan data ?
Bendahara Penerimaan	1	
Petugas Akuntansi	2	• Apa saja strategi mitigasi risiko yang sudah dilakukan dalam menangani permasalahan selisih saldo ?
Petugas Verifikasi data	1	
Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan	1	
Mahasiswa Magang Subbagian Keuangan	1	• Bagaimana efektivitas penerapan mitigasi risiko yang sudah dilakukan ?
Total	7	

Sumber: Data diolah penulis, 2025

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh melalui sumber-sumber yang telah tersedia pada sebelumnya. Sumber data pada data ini meliputi dokumen atau arsip dari instansi, publikasi resmi yang dikeluarkan pemerintah, situs web, internet, penelitian terdahulu, maupun berbagai sumber referensi lainnya. Data sekunder Berperan sebagai pelengkap dan pendukung terhadap data primer yang diperoleh dalam penelitian ini (Warahmah et al., 2023). Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan berasal dari Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari Bendahara Penerimaan dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari Bidang Akuntansi BKAD Kabupaten Kulon Progo periode Januari 2025 serta beberapa jurnal ilmiah, buku, publikasi lain yang *relevan* dengan penerapan manajemen risiko dalam permasalahan pada sistem SIPD.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses pengamatan langsung yang dilakukan terhadap objek di lokasi penelitian, baik yang sedang berlangsung maupun masih dalam tahap perkembangan. Proses yang terjadi mencakup berbagai aktivitas pengamatan mendalam terhadap objek kajian yang melibatkan pancaindra. Tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar, sengaja serta mengikuti urutan tertentu (Luthfiyah, 2019). Dalam penelitian ini, metode observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat secara langsung dalam proses penginputan data penerimaan pajak daerah, mulai dari tahap penginputan hingga proses akuntansi data. Melalui keterlibatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi secara langsung di lapangan.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dengan narasumber, dimana peneliti akan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait dengan topik penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti memahami pandangan, pengalaman, serta pendapat narasumber dengan lebih terperinci dan lengkap (Romdona, 2023). Dalam penelitian ini, wawancara akan

dilakukan guna memperoleh data dan informasi mendalam terkait dengan topik penelitian, dengan melibatkan tujuh narasumber yang telah ditetapkan sebagai bagian dari sampel penelitian.

3. Dokumentasi

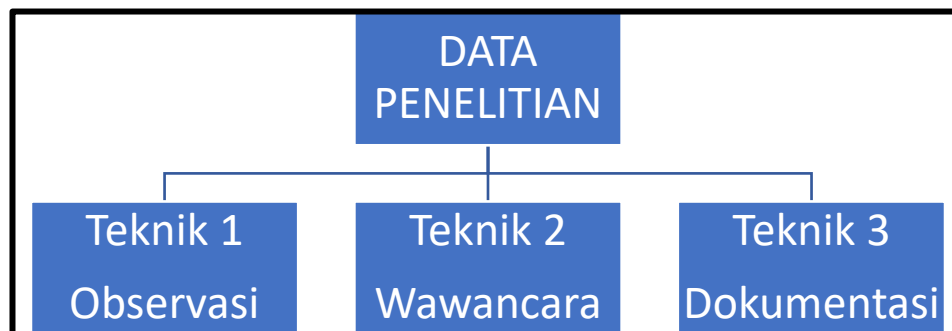
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran berbagai dokumen, arsip, maupun karya ilmiah lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa catatan, laporan, buku, jurnal, artikel, maupun karya ilmiah resmi lainnya. Melalui studi dokumentasi, peneliti akan memperoleh pemahaman mendalam mengenai latar belakang, peristiwa, kebijakan, serta perkembangan yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti (Ardiansyah et al., 2023).

3.5 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, bentuk pertanggungjawaban ilmiah terhadap hasil penelitian diwujudkan melalui upaya memastikan keabsahan data. Proses ini dilakukan melalui tahapan, yakni uji *Credibility* (Kepercayaan), *Transferability* (Keteralihan), *Dependability* (Ketergantungan), dan *Confirmability* (Kepastian). Berikut proses untuk memastikan kevalidan data dalam penelitian:

1. *Credibility* (Kepercayaan)

Kriteria utama untuk menilai kebenaran data penelitian dan informasi yang diperoleh dalam penelitian yaitu *credibility* (kepercayaan). Hal ini berarti bahwa hasil penelitian harus dapat dipercaya, baik oleh pembaca yang bersikap kritis maupun responden sebagai sumber data. Penelitian kualitatif dikatakan memiliki *credibility* (kepercayaan) tingkat tinggi apabila temuan yang dihasilkan mampu menjawab tujuan penelitian, seperti menggali permasalahan secara mendalam atau menggambarkan konteks, proses, dinamika kelompok sosial, maupun pola interaksi yang bersifat kompleks (Susanto et al., 2023). Dalam penelitian ini, untuk menghasilkan tingkat *credibility* (kepercayaan) yang tinggi peneliti menggunakan *triangulasi* teknik. Berikut gambar proses *triangulasi* teknik:



Gambar 3. 1 Triagulasi teknik pengumpulan data penelitian

Sumber: (Susanto et al., 2023)

2. *Transferability* (Keteralihan)

Transferability (Keteralihan) merupakan kriteria yang menunjukkan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks lain yang serupa (Haryono, 2023). Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan deskripsi yang lengkap, rinci, serta sistematis agar konteks penelitian tergambar dengan jelas. Uraian dari hasil penelitian diharapkan memudahkan peneliti lain untuk menggunakan temuan sebagai acuan dalam penelitian lanjutan.

3. *Dependability* (Ketergantungan)

Dependability (Ketergantungan) memiliki tujuan untuk menilai konsistensi dan kehandalan data melalui proses audit terhadap seluruh tahapan penelitian, baik proses yang terjadi maupun hasil penelitian. Audit biasanya dilakukan oleh pihak independen dengan meninjau secara menyeluruh aktivitas peneliti. Oleh karena itu, peneliti harus mampu menunjukkan setiap langkah yang diambil, mulai dari penentuan fokus masalah penelitian, pengumpulan data, analisis data, pemeriksaan keabsahan data hingga penarikan kesimpulan (Syahrani, 2020).

4. *Confirmability* (Kepastian)

Confirmability (Kepastian) dalam penelitian kualitatif mengacu pada transparansi peneliti dalam mengungkapkan proses dan unsur-unsur penelitian yang dilakukan agar dapat dinilai oleh pihak lain. Proses ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar didasarkan pada data bukan karangan semata. Umumnya, *confirmability* dilakukan melalui refleksi hasil pada jurnal, konsultasi

dengan ahli, *peer review*, serta presentasi dalam forum ilmiah untuk memperoleh masukan dan saran penelitian (Mekarisce, 2020).

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode atau cara untuk mengubah data menjadi informasi atau karya ilmiah yang bermakna bagi pembaca, sehingga karakteristik data lebih mudah dipahami. Proses ini sangat memiliki manfaat dalam mengidentifikasi permasalahan dan menemukan solusi, khususnya dalam konteks penelitian (Spradley & Huberman, 2024). Tiga komponen yang menjadi proses utama dalam melakukan analisis data terdiri dari:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan salah satu tahap dalam teknik analisis data kualitatif. Tahap ini melibatkan proses penyederhanaan, pengelompokan, serta pembuangan data yang tidak relevan sehingga data yang tersisa dapat memberikan informasi yang bermakna serta memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan (Spradley & Huberman, 2024). Dalam reduksi data, penulis merangkum seluruh data yang telah diperoleh baik dari proses observasi, wawancara, dokumen, maupun sumber data lainnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses kedua dalam menyusun sekumpulan informasi secara sistematis untuk memberikan gambaran jelas dan memungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Data yang diperoleh dari hasil observasi maupun berbagai sumber lainnya dipilih sesuai kebutuhan kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori yang relevan dan diberikan batasan sesuai dengan fokus permasalahan. Tujuan dari penyajian data yaitu agar informasi yang disajikan kepada pembaca menjadi lebih terstruktur, rinci, bermakna secara substantif, serta didukung oleh data pendukung yang memadai untuk memperkuat hasil analisis (Spradley & Huberman, 2024). Proses kedua ini akan dilakukan peneliti melalui penyusunan informasi-informasi yang memperkuat topik penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam proses analisis data yang saling berkaitan. Penarikan kesimpulan bukan sekedar langkah terakhir dalam penelitian, melainkan bagian integral dari keseluruhan proses penelitian. Kesimpulan yang diperoleh bersifat sementara dan akan terus dikaji ulang seiring berjalannya proses penelitian (Spradley & Huberman, 2024). Oleh karena itu, selama kegiatan penelitian berlangsung kesimpulan akan terus diverifikasi melalui peninjauan kembali terhadap data lapangan, catatan observasi, serta dokumen lainnya guna memastikan keakuratan, konsistensi, dan validitas temuan penelitian terkait manajemen risiko dalam permasalahan sistem SIPD.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum BKAD Kabupaten Kulon Progo

4.1.1 Sejarah BKAD Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2023, dibentuk lembaga pemerintah yang bertugas membantu Bupati dalam menjalankan fungsi pendukung urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan aset. Lembaga ini bernama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Pembentukan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo didasarkan pada delapan landasan hukum, yaitu: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 2 Tahun 2013 mengenai Kewenangan Urusan Keistimewaan DIY, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2021 yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2016. Tujuan utama pembentukan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo adalah untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik secara akuntabel dan responsif. Sejak tahun 2001, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo telah mengalami tiga kali perubahan nama: pertama sebagai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) pada 2001–2008, kemudian menjadi Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) pada 2009–2016, dan akhirnya menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sejak 2017 hingga sekarang.

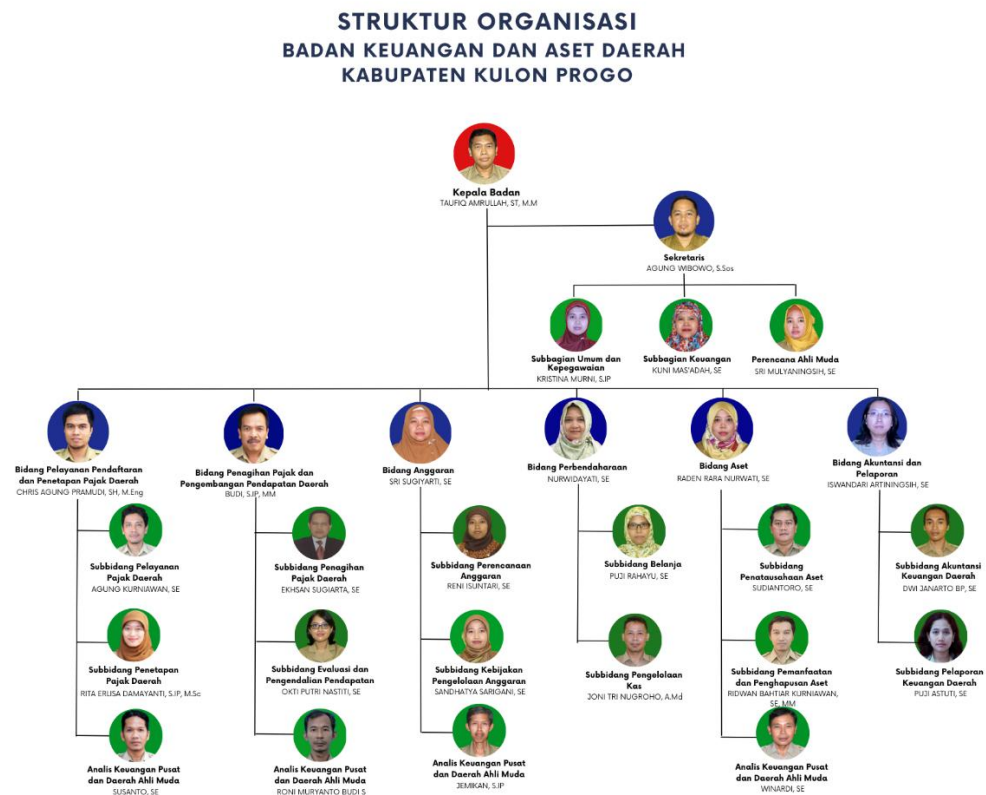
4.1.2 Tugas dan Fungsi BKAD Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2023, BKAD bertugas mendukung bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan dan

pengelolaan aset daerah. Untuk menjalankan tugas tersebut, BKAD Kabupaten Kulon Progo memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun rencana dan program kerja setiap Tahun Anggaran (TA).
2. Merumuskan kebijakan terkait Pajak Daerah, Pendapatan, Anggaran, Perbendaharaan, Aset, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
3. Mengoordinasikan layanan dan pelaksanaan urusan Pajak, Pendapatan, Anggaran, Perbendaharaan, Aset, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan Daerah.
4. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang yang berada dibawah BKAD.
5. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan atas kinerja pelayanan keuangan dan aset daerah.
6. Mengoordinasikan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
7. Menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
8. Menangani urusan kesekretariatan internal.
9. Mengoordinasikan reformasi birokrasi di lingkungan BKAD.
10. Melaksanakan tugas sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang.
11. Menyusun perjanjian kinerja dan membina jabatan fungsional di lingkungan badan.
12. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas.
13. Menjalankan tugas tambahan sesuai arahan atasan.

4.1.3 Struktur dan Tata Kelola BKAD Kabupaten Kulon Progo



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BKAD Kabupaten Kulon Progo

Sumber: *Website* BKAD Kabupaten Kulon Progo

Tugas dari masing-masing bidang yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat, bertanggung jawab atas perencanaan, mengoordinasikan Sub Bagian Sekretariat, administrasi, pengelolaan data, akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, inovasi, pembinaan, serta pelaporan dalam mendukung tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah. Dalam pelaksanaannya, fungsi sekretariat meliputi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo.
 - b. Penyediaan bahan kebijakan terkait perencanaan dan program kerja.
 - c. Koordinasi mengenai kebijakan, rencana, program kerja, anggaran, dan aset yang dimiliki daerah.

- d. Dukungan administrasi yang mencakup tata usaha, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan arsip-arsip.
 - e. Pengelolaan akuntabilitas kinerja, data dan informasi.
 - f. Penyusunan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal dan inovasi layanan publik.
 - g. Pembinaan serta koordinasi jabatan fungsional di Bidang Sekretariat.
 - h. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas Badan dan Sekretariat.
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.
2. Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah, bidang ini bertanggung jawab atas kebijakan, mengkoordinasikan Sub Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah, pembinaan, pelaksanaan, serta evaluasi terkait pelayanan, pendaftaran, dan penetapan pajak daerah, termasuk pendataan dan pemuktakhiran data pajak. Bidang ini bertugas untuk merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan pendaftaran dan penetapan pajak daerah. Fungsi utamanya :
- a. Menyusun rencana program kerja terkait pajak daerah.
 - b. Merumuskan kebijakan teknis terkait pelayanan, pendaftaran, dan penetapan pajak daerah.
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan program kerja yang telah dibuat dan kebijakan teknis.
 - d. Melaksanakan pendaftaran, pendataan, dan pemuktakhiran data Objek Pajak serta Wajib Pajak Daerah.
 - e. Membina jabatan fungsional dan administrasi Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah.
 - f. Mengelola administrasi Bidang Pelayanan Pajak Daerah.
 - g. Melakukan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
3. Bidang Penagihan, bidang ini fokus pada kebijakan, mengoordinasikan Sub Bidang Penagihan, pelaksanaan, dan evaluasi penagihan pajak serta pengembangan potensi pendapatan daerah, termasuk *intensifikasi* dan *ekstensifikasi* pendapatan. Bidang ini bertanggung jawab merumuskan

kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan penagihan pajak serta pengembangan pendapatan daerah. Fungsi utama bidang ini antara lain :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Penagihan.
 - b. Merumuskan kebijakan teknis terkait penagihan pajak dan pengembangan pendapatan daerah.
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan program kerja, kebijakan teknis, evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah.
 - d. Mengoordinasikan pengembangan potensi pendapatan daerah.
 - e. Menyusun bahan analisis potensi pendapatan daerah (Kecuali yang dikelola oleh BUMD dan BLUD).
 - f. Menyiapkan bahan *intensifikasi* dan *ekstensifikasi* pendapatan daerah selain pajak.
 - g. Menyiapkan usulan target pendapatan daerah.
 - h. Membina jabatan fungsional dan administrasi Bidang Penagihan.
 - i. Mengelola administrasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas Bidang Penagihan.
4. Bidang Anggaran, bidang ini mengelola seluruh aspek perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan anggaran daerah. Tugasnya meliputi kebijakan teknis, pengelolaan administrasi penyusunan dokumen anggaran, serta evaluasi dan pelaporan terkait dengan pengelolaan anggaran daerah. Bidang Anggaran bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, mengoordinasikan Sub Bidang Anggaran, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan anggaran, dll. Fungsi utama Bidang Anggaran :
- a. Menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis anggaran.
 - b. Mengoordinasikan perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan anggaran.
 - c. Membina dan mengelola administrasi serta jabatan fungsional di Bidang Anggaran.
 - d. Menyusun pedoman, melakukan verifikasi, dan mempunyai hak untuk persetujuan Dokumen Anggaran (DPA/DPPA).
 - e. Menyusun rancangan Peraturan Bupati terkait APBD dan perubahannya.

- f. Membina jabatan fungsional dan administrasi Bidang Anggaran.
 - g. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
 - h. Melaksanakan tugas lain sesuai arahan dan bidangnya.
5. Bidang Perbendaharaan, bidang ini memiliki tugas dan fungsi yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kulon Progo berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bidang Perbendaharaan bertugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan Sub Bidang Perbendaharaan, membina, mengawasi, serta mengendalikan pelaksanaan belanja dan pengelolaan Kas Daerah (Kasda). Fungsi utama bidang ini meliputi :
- a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Perbendaharaan.
 - b. Merumuskan kebijakan teknis terkait perbendaharaan.
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis perbendaharaan.
 - d. Mengoordinasikan pengelolaan dan penatausahaan belanja daerah.
 - e. Mengelola kas sesuai kebijakan teknis yang sudah ada.
 - f. Mengelola administrasi di Bidang Perbendaharaan
 - g. Membina jabatan fungsional dan administrasi Bidang Perbendaharaan.
 - h. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang tersebut.
 - i. Melaksanakan fungsi tambahan sesuai arahan atasan dan lingkup tugas bidang.
6. Bidang Aset, bidang ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan aset daerah berjalan tertib, efisien, dan akuntabel. Bidang Aset bertugas untuk merumuskan kebijakan, mengoordinasikan Sub Bidang Bidang Aset, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan, penatausahaan, pemanfaatan, serta penghapusan Barang Milik Daerah. Fungsi utamanya meliputi :
- a. Menyusun rencana kerja, kebijakan teknis, dan pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah).
 - b. Mengoordinasikan perencanaan, penatausahaan, pemanfaatan, dan penghapusan BMD (Barang Milik Daerah).

- c. Membina jabatan fungsional dan administrasi Bidang Aset.
 - d. Menyusun standar harga, barang, dan kebutuhan BMD (Barang Milik Daerah).
 - e. Membina jabatan fungsional dan administrasi Bidang Aset.
 - f. Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Aset.
7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, bidang ini memiliki tugas untuk memastikan laporan keuangan daerah tersusun secara akurat dan sesuai dengan regulasi pemerintah. Bidang Akuntansi dan Pelaporan bertugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membina, mengawasi, dan mengendalikan akuntansi pemerintahan daerah serta pelaporan keuangan daerah. Fungsi utamanya meliputi :
- a. Menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis.
 - b. Mengoordinasikan pelaksanaan program kerja terkait akuntansi dan pelaporan.
 - c. Membina akuntansi keuangan daerah dan penyusunan Laporan Keuangan Daerah.
 - d. Mengawasi evaluasi realisasi keuangan daerah.
 - e. Membina jabatan fungsional dan administrasi Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
 - f. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

4.2 Hasil dan Pembahasan

4.2.1 Penyebab Selisih Saldo Dalam SIPD Pada Laporan Keuangan BKAD Kabupaten Kulon Progo

Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintahan dalam satu periode Tahun Anggaran (TA) memiliki peran penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat. Laporan keuangan ini memberikan informasi yang penting bagi para pengambil kebijakan dan kepada masyarakat umum. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan dengan kualitas baik, transparan, dan dapat dipercaya guna memenuhi *ekspektasi* masyarakat kepada pemerintah (Sari et al., 2020). Dalam

proses penyusunan laporan keuangan tidak lepas dari berbagai risiko yang muncul sehingga mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Andi Kusnadi et al., 2022). Salah satu risiko yang sering menyebabkan penurunan kualitas laporan keuangan yaitu risiko selisih saldo.

Berdasarkan data periode Januari 2025 dari Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang disusun oleh Bendahara Penerimaan dan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disusun oleh Bidang Akuntansi, ditemukan adanya selisih yang terjadi antara kedua laporan tersebut. Adapun perbandingan data antara LPJ dan LRA yang menjadi dasar identifikasi risiko, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 1 Perbandingan LPJ dan LRA di SIPD

No	Nama Pendapatan	LPJ (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pendapatan Denda Restoran	568.473	12.399	556.074
2.	Pendapatan Denda PBJT Hotel	443.935	0	443.935
3.	Pendapatan Denda PBJT Jasa Boga	164.376	7.992	156.384
4.	Pendapatan Denda PBJT Parkir	250	0	250
5.	Pendapatan Denda PBJT Hiburan	3.600	0	3.600
6.	Pendapatan Denda Opsen PKB	1.259.100	226.600	1.032.500
Total				2.192.733

(Data Diolah Penulis, 2025)

Berdasarkan tabel 4.1 dapat disimpulkan, bahwa ada potensi risiko berupa selisih saldo pada Laporan Keuangan di BKAD Kabupaten Kulon Progo. Selisih ini terjadi pada beberapa beberapa komponen pendapatan daerah yang menjadi bagian penting dalam penyusunan laporan keuangan. Selama bulan Januari 2025, ditemukan perbedaan antara Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp2.192.733. Meskipun nilai selisih tersebut tergolong kecil secara nominal, keberadaannya tetap mencerminkan ketidaktepatan data yang dapat mempengaruhi akurasi laporan keuangan secara keseluruhan.

Berdasarkan observasi dan mengkonfirmasi langsung melalui wawancara personal dengan pihak terkait, dapat dikumpulkan data terkait dengan faktor-faktor yang menjadi penyebab selisih saldo pada laporan keuangan melalui SIPD di

BKAD Kabupaten Kulon Progo. Selisih saldo tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Kurangnya Pemahaman Pegawai

Faktor penyebab terjadinya permasalahan selisih saldo pada sistem SIPD di BKAD Kabupaten Kulon Progo yaitu berasal dari pegawai. Kurang pemahaman pegawai terkait penginputan data menjadi salah satu faktor permasalahan selisih saldo seperti pernyataan dari Pak Yakub selaku Bendahara Penerimaan,

”Menurut pengamatan yang saya lakukan semenjak SIPD mulai digunakan, salah satu penyebab terjadinya selisih saldo berasal dari pegawai yang kurang memahami proses penginputan data yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti kurangnya pelatihan yang memadai menyebabkan pegawai kesulitan dalam mengoperasikan sistem SIPD dan kurangnya pemahaman mengenai fitur-fitur yang ada di dalamnya. Selain itu, pekerjaan penginputan data pada SIPD sering diberikan kepada anak magang dikarenakan banyaknya beban pekerjaan yang ditanggung. Oleh karena itu, pegawai menjadi kurang memahami fitur-fitur yang ada pada SIPD. Pelatihan dan panduan yang diberikan oleh Pihak Kemendagri kurang memadai, bahkan pihak Kemendagri belum pernah mengadakan sosialisasi atau pelatihan mengenai penggunaan sistem SIPD. Selain itu, pihak BKAD sendiri belum pernah melakukan pelatihan maupun sosialisasi terkait SIPD. Prosedur mengenai penginputan data sedikit rumit untuk dipahami karena ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan serta fitur-fitur yang ada di dalam sistem SIPD rumit apabila tidak terbiasa.”
(Wawancara personal, Januari 2025).

Untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam, peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan salah satu anak magang yang pernah terlibat langsung dalam proses penginputan data. Mita, selaku mahasiswa magang di Subbagian Keuangan yang ditugaskan membantu bendahara penerimaan,

”Pada saat saya pertama kali diberikan tugas untuk melakukan penginputan data di SIPD, saya hanya diberikan penjelasan singkat bagaimana pemrosesan data tersebut dilakukan dan langsung diminta mulai menginput data tersebut ke sistem dengan pengawasan. Tidak

ada pelatihan yang diberikan terkait dengan fitur-fitur yang ada di dalamnya sehingga saya harus mengeksplorasi sendiri fitur yang ada di dalamnya. Pada awal-awal saya menggunakan sistem tersebut, setelah saya selesai melakukan penginputan nanti bendahara penerimaan akan mengecek pekerjaan saya. Kemudian saya pernah melakukan kesalahan penginputan, kesalahan pernah saya lakukan antara lain: salah memasukan nominal, salah memasukan nama akun, dan salah memasukan tanggal transaksi karena sedikit rumit. Dampak dari kesalahan input tersebut menyebabkan terjadinya selisih saldo pada LPJ dan BKU.” (Wawancara Personal, Mei 2025).

Sistem SIPD dinilai memberikan dampak positif atau membantu pekerjaan pegawai pemerintahan daerah. Meskipun Pegawai Pemerintahan Daerah terbuka dengan perubahan penggunaan sistem, namun pengguna belum terbiasa dalam mengoperasikan dan mengetahui fitur-fitur yang ada di dalamnya. Adanya perbedaan yang signifikan dengan sistem lama yang digunakan, baik dari sisi tampilan maupun *nomenklatur* program yang mengalami perubahan secara menyeluruh. Hal tersebut memerlukan waktu untuk pemahaman yang lebih mendalam dari sistem SIPD. Dampak dari kesalahan data ini akan menimbulkan kesalahan data yang dihasilkan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tidak akurat. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa kurangnya pegawai dalam mengoperasikan sistem dapat menimbulkan adanya risiko yang dapat merugikan. Diperlukan pembelajaran dan pendampingan bagi para pegawai dalam penggunaan sistem SIPD sehingga kendala dalam pengoperasiannya dapat diminimalisir (Ekaputra, 2021).

b. Kurang Cermatnya Pegawai

Prinsip kehati-hatian pegawai dalam mengelola data keuangan daerah menjadi sesuatu yang penting untuk memastikan akurasi dan keandalan laporan keuangan daerah. Dalam praktik penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), faktor kurang cermatnya pegawai dapat menimbulkan kesalahan yang berpotensi menyebabkan permasalahan yang dapat merugikan (Sijabat et al., 2024). Faktor kedua penyebab selisih saldo pada BKAD Kabupaten Kulon Progo berasal dari pegawai yang kurang cermat dalam melakukan pemrosesan data. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Pihak Verifikasi Data SIPD,

"Alur Proses Verifikasi, saya lakukan setelah data dari satu transaksi penerimaan daerah selesai dibuat oleh bendahara penerimaan. Data yang dimaksud disini adalah Surat Tanda Bukti Penerimaan (STBP). Setelah bendahara penerimaan membuat STBP untuk setiap transaksi penerimaan, saya kemudian melakukan proses verifikasi terhadap data tersebut. Verifikasi data ini biasanya saya lakukan pada saat bendahara penerimaan akan menyusun Surat Tanda Setoran (STS). Dalam sistem SIPD, terdapat juga fitur yang memudahkan pekerjaan saya yaitu verifikasi massal yang memungkinkan pengguna untuk melakukan verifikasi banyak data sekaligus. Fitur ini sangat membantu saya dalam mempercepat proses kerja, mengingat jumlah data yang akan saya verifikasi lumayan banyak ditambah apabila data yang belum diverifikasi menumpuk saya akan kewalahan dalam melakukan pemrosesan data. Oleh karena itu, saya sering memanfaatkan fitur ini agar data dapat segera diproses ke tahap selanjutnya." (Wawancara Personal, Februari 2025).

Kinerja dari pegawai pemerintahan daerah dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara hasil kerja yang dicapai dengan peran serta pihak-pihak terkait dengan waktu yang digunakan untuk penyelesaian tugas dan tanggung jawab tersebut. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai, antara lain: pertama, memberikan uraian tugas yang jelas kepada pegawai sehingga mereka mampu memahami tanggung jawab dan ekspektasi kerja secara tepat dan terarah. Kedua, perlu adanya keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk penyelesaian tugas yang diberikan. Terakhir, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga mampu meminimalkan gangguan yang dapat menghambat produktivitas (Ummah, 2019).

c. Kurang Komunikasi

Komunikasi merupakan peranan penting satu pihak dengan pihak lainnya. Komunikasi akan memastikan tugas dan tanggung jawab pada suatu organisasi atau instansi berjalan dengan lancar. Apabila komunikasi tidak berjalan atau terjalin dengan efektif, dampaknya adalah koordinasi antara pegawai maupun antara pimpinan dan staf berpotensi mengalami hambatan. Miss komunikasi yang terjadi akan menyebabkan ketidaksesuaian data, keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan, serta penurunan mutu layanan (Kapoh et al., 2020).

Berdasarkan Wawancara dengan pak Jati selaku salah satu staf akuntansi,

"Komunikasi yang saya lakukan dengan bendahara penerimaan biasanya dilakukan ketika selisih saldo terdeteksi, biasanya saat saya

memeriksa data akhir bulan. Jika ada masalah, saya akan langsung mendatangi bendahara penerimaan untuk mengkonfirmasi dan mencari tahu bersama sumber permasalahan tersebut. Komunikasi antara saya dan bendahara penerimaan merupakan salah satu refleksi saya apabila saya menemukan adanya perbedaan saldo. Saya melakukan komunikasi langsung dengan Bendahara Penerimaan karena saya merasa yang paling banyak berkaitan dengan pekerjaan saya adalah Bendahara Penerimaan. Tetapi, komunikasi tersebut tidak akan menyelesaikan permasalahan apabila permasalahan yang muncul berasal dari beberapa bidang terkait. Sangat penting untuk melibatkan pihak lain selain bendahara penerimaan, karena proses data melalui berbagai tahapan yang memerlukan bantuan dari pihak-pihak terkait lainnya untuk menyelesaikan masalah tersebut.” (Wawancara Personal, Februari 2025).

Sementara itu, menurut Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan,

”Biasanya, rapat koordinasi kami adakan setiap satu bulan sekali untuk mengevaluasi seluruh kegiatan dan permasalahan yang terjadi di setiap bidang disini. Melalui rapat tersebut, harapannya setiap bidang bisa menyampaikan kendala yang dihadapi, sehingga solusi dapat kita temukan secara bersama-sama.” (Wawancara Personal, Januari 2025).

Koordinasi antara pihak-pihak terkait dengan data SIPD menjadi satu faktor penting untuk menjamin akurasi dan konsistensi data yang diintegrasikan bersama melalui sistem SIPD. Koordinasi ini mencakup komunikasi yang solid antar pihak-pihak yang terlibat dalam SIPD, sehingga permasalahan yang muncul dalam sistem SIPD dapat segera ditangani dan ditemukan solusi yang tepat dan terbaik. Komunikasi serta kolaborasi antar pihak yang baik, akan mendukung kelancaran pelaporan dalam SIPD sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat dan sinkron (Sijabat et al., 2024).

2. Sistem atau Teknologi SIPD

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem yang berbasis online yang mempermudah pemerintahan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Sistem ini merupakan sistem yang dirancang untuk menghasilkan data keuangan yang lebih cepat dan berkualitas. Namun, sistem ini belum

sepenuhnya sempurna untuk digunakan dan terkadang mengalami perubahan kebijakan dari pihak Kemendagri, sehingga dapat mempengaruhi kelancaran pengelolaan data keuangan (Alfani & Nasution, 2022). Ketidaksempurnaan sistem menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya permasalahan selisih saldo pada laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Bendahara Penerimaan yang berhubungan langsung dengan penggunaan SIPD,

“Selain dari permasalahan yang disebabkan karena human error, kami juga menghadapi permasalahan yang bersumber dari sistem nya sendiri. Permasalahan ini seperti, lambatnya respon sistem saat jam kerja sibuk, keterbatasan adanya fitur untuk mengoreksi data yang sudah diinput, serta biasanya ada pembaharuan atau perubahan kebijakan beberapa akun pendapatan secara mendadak dari pusat dan belum diikuti dengan panduan teknis yang jelas sehingga kadang menyebabkan double entry. Kalau di BKAD Kabupaten Kulon Progo sendiri, permasalahan dari sistem yang sangat berdampak pada terjadinya selisih saldo adalah adanya kebijakan perarturan sistem contra pos pada beberapa jenis akun pendapatan sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya permasalahan selisih saldo karena adanya double entry otomatis karena sistem. Biasanya kami akan melaporkan permasalahan ini melalui grup koordinasi bersama Kemendagri atau kami menghubungi pihak Kemendagri melalui Call Center yang tertera di SIPD.” (Wawancara personal, Januari 2025).

Sementara itu, menurut salah satu staff akuntansi,

“Menurut saya, permasalahan selisih saldo ini juga tidak sepenuhnya berasal dari kesalahan penginputan dari pihak bendahara penerimaan. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya, apabila bendahara penerimaan melakukan pencatatan penerimaan pajak daerah saat sistem sedang sibuk, meskipun data tersebut sudah tercatat pada LPJ bendahara penerimaan, data tersebut belum tercatat pada LRA di bidang kami. Dari permasalahan tersebut, akan berdampak adanya selisih saldo antara LPJ dan LRA, sehingga perlu dilakukan rekonsiliasi data untuk menemukan jenis akun yang bermasalah.” (Wawancara personal, Februari 2025).

Ketidaksempurnaan sistem SIPD merupakan salah satu permasalahan yang muncul dari penggunaan sistem baru ini. Permasalahan yang sering muncul antara lain

terjadinya kendala teknis seperti, sulit akses terhadap SIPD, seringnya server mengalami error, serta jaringan yang terkadang macet atau lambat saat digunakan. Kondisi- kondisi ini menyebabkan pengimplementasian sistem SIPD di BPPKAD Kabupaten Wonosobo belum berjalan secara optimal dan berdampak pada kelancaran proses pelaporan keuangan (Wahyuningsih, 2022).

3. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan aturan baku yang bisa menjadi pedoman kerja pegawai dalam suatu instansi. SOP memiliki peran sebagai panduan resmi yang mengatur tata cara pelaksanaan tugas secara konsisten dan terstandarisasi. Apabila SOP tidak tersedia, pegawai tidak memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kondisi ini akan berpotensi berdampak negatif terhadap instansi tersebut (Inofi, 2023) Menurut wawancara dengan pihak verifikasi data,

“ Pada sistem SIPD memang sudah tersedia panduan untuk pemrosesan data, namun di BKAD Kabupaten Kulon Progo belum terdapat SOP yang jelas terkait pelaksanaan pekerjaan ini. Tidak ada aturan resmi mengenai batas waktu penyelesaian pemrosesan data, misalnya kewajiban menyelesaikan dalam satu hari. Oleh karena itu, dalam praktiknya saya biasanya menunggu permintaan dari bendahara penerimaan untuk melakukan verifikasi data, sementara itu saya mengerjakan tugas lain terlebih dahulu. Hingga saat ini, belum terdapat sanksi yang diberikan oleh BKAD Kabupaten Kulon Progo maupun Kemendagri terhadap keterlambatan dalam pelaksanaan proses verifikasi data.” (Wawancara Personal, Februari 2025).

Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terstandarisasi merupakan langkah krusial untuk memastikan konsistensi dan akurasi dari pelaksanaan tugas pegawai. SOP ini memiliki peranan yang krusial dan efektif untuk mengurangi kesalahan operasional dari pihak pegawai serta meningkatkan efisiensi kerja dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, pengembangan dan implementasi SOP yang optimal menjadi langkah penting dalam mengatasi permasalahan selisih saldo serta meningkatkan mutu pada pelaporan keuangan secara menyeluruh (Resdiana, 2021).

4.2.2 Proses Manajemen Risiko dan Evaluasi Penerapan Mitigasi Risiko pada BKAD Kabupaten Kulon Progo

Proses manajemen risiko merupakan serangkaian kebijakan yang diterapkan, prosedur, dan praktik dari mitigasi risiko yang sudah ada. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk mengelola risiko dari suatu kegiatan operasional organisasi atau instansi pemerintahan. Proses yang dimaksud dalam manajemen risiko mencakup kegiatan komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks risiko, identifikasi risiko, analisis dan evaluasi risiko, mitigasi atau penangan risiko, serta pemantauan dan peninjauan berkala. Menurut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten kulon Progo,

”Menurut saya, BKAD Kabupaten Kulon Progo telah melakukan penerapan manajemen risiko dengan langkah awal mengidentifikasi potensi permasalahan yang muncul dari penggunaan sistem SIPD. Langkah nyata yang sudah dilakukan oleh kami yaitu, adanya rekonsiliasi data keuangan selama periode waktu sebulan serta saya selaku kepala BKAD menjembatani antara pihak-pihak yang terkait sehingga koordinasi antar pihak bisa lebih kuat lagi. Pemantauan dan evaluasi risiko ini biasanya saya lakukan secara berkala, khususnya menjelang penyusunan laporan keuangan triwulanan dan akhir tahun. Biasanya dari rapat tersebut, kami bersama-sama akan mengidentifikasi sumber permasalahan dan mencari solusi terbaik dari permasalahan yang terjadi. Saya juga akan menetapkan tenggat waktu internal yang lebih awal dari batas waktu (deadline) yang diberikan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), guna memastikan laporan keuangan yang disusun lebih akurat dan tepat waktu.”
(Wawancara Personal, Februari 2025).

Untuk memperoleh informasi mendalam mengenai proses manajemen risiko yang sudah terjadi di BKAD Kabupaten Kulon Progo, penulis melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dengan proses rekonsiliasi data, yaitu bendahara penerimaan,

"Menurut saya, peran yang paling krusial untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul adalah peran dari bendahara penerimaan. Saya mengatakan demikian karena awal suatu transaksi keuangan terjadi berasal dari saya. Oleh karena itu, saya juga menyusun sendiri kumpulan permasalahan yang muncul dan akan menjadi bahan mitigasi risiko ke depan. Langkah nyata yang saya lakukan adalah melakukan pencatatan harian secara disiplin terhadap seluruh transaksi penerimaan. Sehingga dari langkah tersebut, saya beranggapan bahwa akan lebih mudah dalam melakukan rekonsiliasi data. Saya akan melakukan rekonsiliasi data dengan pihak terkait, misalnya adanya selisih dengan pihak akuntansi saya akan melakukan komunikasi. Saya akan melakukan rekonsiliasi data dan dari hasil rekonsiliasi tersebut, biasanya akan ditemukan sumber permasalahan. Setelah proses rekonsiliasi selesai dilakukan akan dilakukan proses perbaikan data dengan waktu sebelum tenggat waktu yang sudah ditentukan." (Wawancara Personal, Maret 2025).

Pada Pemerintahan Daerah (Pemda), terdiri dari perangkat daerah yang berada di bawahnya. Pimpinan perangkat daerah, seperti kepala dinas atau kepala badan memiliki peranan yang krusial atau penting untuk pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah. Tanggung jawab pimpinan dalam memastikan setiap potensi risiko yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang dilakukan dapat diidentifikasi, dianalisis, dan dikendalikan dengan tepat. Tanggung jawab ini mencakup integrasi manajemen risiko dalam proses perencanaan strategis maupun operasional organisasi atau instansi. Selain itu, melakukan penerapan langkah-langkah mitigasi yang efektif guna meminimalkan dampak risiko terhadap pencapaian tujuan dari organisasi atau instansi pemerintahan (Pebriani, 2019). Setelah pimpinan melaksanakan penerapan manajemen risiko terhadap risiko yang timbul dalam kegiatan operasional, diperlukan evaluasi untuk menilai apakah langkah-langkah mitigasi yang diterapkan telah berjalan secara efektif dan mampu menurunkan tingkat potensi risiko yang ada. Dalam rangka menilai efektivitas penerapan mitigasi risiko oleh pimpinan BKAD Kabupaten Kulon Progo, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Subbagian Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan,

"Kalau saya lihat secara keseluruhan, proses dalam pelaksanaan strategi mitigasi yang dilakukan oleh Kepala BKAD Kabupaten Kulon Progo sudah berjalan cukup baik. Beliau telah melakukan pemantauan rutin agar laporan keuangan yang nantinya di laporkan oleh BKAD Kabupaten Kulon Progo akurat dan dapat dipercaya. Apabila ditemukan permasalahan, beliau juga langsung tanggap apabila

terjadi permasalahan mengenai operasional BKAD dan kami akan berkoordinasi untuk melakukan rapat. Meskipun demikian, apabila sudah dilakukan rapat koordinasi, masih sering ditemukan perbedaan pendapat untuk mencari jalan tengahnya. Perbedaan tersebut kadang sampai berlarut-larut dan permasalahan yang harusnya selesai malah nambah. Kalau dari pengamatan saya, saya melihat adanya kurangnya komunikasi antar pihak sehingga mereka tetap pada pendapat mereka.” (Wawancara Personal, Februari, 2025).

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi,

” Perbedaan saldo masih kerap terjadi meskipun upaya mitigasi risiko telah diterapkan. Kondisi ini menurut saya umumnya disebabkan oleh kesalahan manusia (human error) dalam proses pengolahan data sehingga permasalahan selisih saldo masih kerap terjadi. Menurut saya proses risiko berupa rekonsiliasi data sudah berlangsung cukup baik, biasanya staf kami yang melakukan tugas pemantauan data keuangan akan berkoordinasi dengan bendahara penerimaan. Biasanya kami akan mencocokkan data keuangan tersebut, setelah ditemukan letak perbedaan saldo yang terjadi. Kami nantinya akan melakukan unposting jurnal untuk memperbaiki data yang dibuat oleh bendahara penerimaan.” (Wawancara Personal, Maret 2025).

Untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai optimalisasi pelaksanaan mitigasi risiko melalui rekonsiliasi data, penulis melakukan wawancara dengan Bendahara Penerimaan,

”Proses mitigasi berupa rekonsiliasi data dengan pihak terkait sudah berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, walaupun saya sudah melakukan pencatatan data penerimaan secara harian, saya masih memerlukan banyak waktu untuk menemukan sumber permasalahan selisih saldo dan memperbaiki data agar balance. Tenggat waktu yang diberikan oleh kepala BKAD sebenarnya memiliki tujuan baik, tetapi saya merasa memerlukan banyak waktu untuk melakukan perbaikan data ditambah lagi proses yang dilalui harus melalui 3 tahapan dengan melibatkan pihak lain terlebih dahulu sebelum saya melakukan perbaikan. Selain harus melibatkan pihak lain, saya juga memiliki tugas dan tanggung jawab harian untuk melakukan pencatatan harian penerimaan daerah. Kendala yang saya hadapi dalam proses rekonsiliasi dan perbaikan data adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dapat membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab saya. Akibatnya, pekerjaan rutin seperti pencatatan harian menjadi

terhambat, bahkan tertunda, karena harus memprioritaskan proses rekonsiliasi dan koreksi data tersebut karena adanya tenggat waktu yang diberikan untuk penyelesaian pekerjaan tersebut.” (Wawancara Personal, Maret 2025).

Lingkungan pengendalian dari suatu risiko yang muncul mencerminkan kondisi internal organisasi atau instansi dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pengendalian internal dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan program kerja. Peranan pimpinan sangat krusial sebagai teladan dalam upaya penegakan nilai integritas pemerintahan daerah serta etika kerja di lingkungan pemerintahan. Pada Satker X, diketahui bahwa penerapan pengendalian pimpinan sudah berjalan dengan cukup baik. Namun demikian, ada beberapa aspek yang masih memerlukan peningkatan agar penegakan integritas dan etika berjalan dengan optimal. Penerapan Prosedur Operasional (POS) juga belum dilakukan secara konsisten, sehingga diperlukan kepatuhan dan evaluasi secara berkala pada pelaksanaan mitigasi risiko. Selain itu, pada unsur komitmen terhadap kompetensi pegawai, belum adanya evaluasi yang bersifat formal dan terstruktur. Walaupun demikian, evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan di Satker X sudah dilakukan melalui rapat mingguan bersama pihak terkait dengan agenda yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan permasalahan yang terjadi (Indriani & Siswantoro, 2023).

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan dari penelitian pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo terkait penerapan strategi mitigasi risiko sebagai upaya mengatasi selisih saldo pada sistem SIPD di BKAD Kabupaten Kulon Progo dapat disimpulkan:

1. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terdapat tiga faktor utama penyebab terjadinya selisih saldo pada laporan keuangan di SIPD. Pertama, Faktor SDM yang kurang memahami sistem sebagai akibat dari minimnya pelatihan yang diberikan sehingga pegawai mengalami kesalahan penginputan data. Kedua, ketidaksempurnaan sistem yang masih sering mengalami kendala teknis seperti error dan lambat, hal ini menyebabkan data tidak tercatat langsung dengan benar sehingga terjadi selisih saldo. Terakhir, belum adanya SOP yang jelas membuat pegawai tidak memiliki panduan konsisten yang memperburuk kesalahan dalam pengolahan data. Ketiga faktor tersebut saling terkait dan perlu ditangani secara bersamaan untuk mengurangi permasalahan selisih saldo.
2. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak terkait, diketahui bahwa proses manajemen risiko di BKAD Kabupaten Kulon Progo sudah berjalan cukup baik, terutama peran aktif pimpinan secara rutin memantau proses pelaporan keuangan serta menerapkan langkah mitigasi risiko terhadap permasalahan selisih saldo. Bentuk mitigasi risiko yang sudah diterapkan di BKAD Kabupaten Kulon Progo melalui kegiatan rekonsiliasi data. Namun, dalam pelaksanaan mitigasi ini masih menghadapi beberapa kendala, khususnya di bendahara penerimaan seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menyelesaikan pekerjaan serta masih lemahnya komunikasi antara pihak-pihak terkait dalam proses perbaikan data. Kendala-kendala ini menghambat efektivitas upaya mitigasi risiko yang diterapkan serta perlu mendapat perhatian lebih lanjut agar pengelolaan risiko di BKAD Kabupaten Kulon Progo dapat berjalan efektif dan optimal sehingga potensi risiko selisih saldo dapat diminimalisir.

5.2 Implikasi

5.2.1 Implikasi Teoritis

Penelitian yang dilakukan ini turut berperan dalam memperluas referensi ilmiah di bidang manajemen risiko pada lingkungan pemerintahan, khususnya terkait dengan evaluasi pelaksanaan strategi mitigasi terhadap risiko selisih saldo pada penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo. Hasil Penelitian ini sejalan dengan konsep dasar manajemen risiko yang memberikan penegasan bahwa upaya mitigasi risiko merupakan elemen penting dalam rangka mengurangi potensi terjadinya risiko serta menekan dampak risiko yang akan ditimbulkan. Dengan menelaah efektivitas strategi mitigasi yang sudah diterapkan dan dijalankan, penelitian ini tidak hanya mendukung teori yang sudah ada, tetapi juga memiliki peran untuk memberikan gambaran secara nyata mengenai penerapan praktik pengendalian risiko di lingkungan instansi pemerintahan, khususnya dalam proses pengelolaan sistem keuangan berbasis digital melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

5.2.2 Implikasi Praktik

Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo dapat bekerja sama dengan Pihak Kemendagri untuk mengadakan pelatihan dan sosialisasi yang insentif dan berkelanjutan bagi pegawai. Pelatihan yang diberikan fokus pada aspek teknis penggunaan sistem, termasuk langkah-langkah atau prosedur penginputan data penerimaan dan klasifikasi jenis penerimaan pajak daerah. Pelatihan tersebut dapat dibarengi dengan kegiatan forum diskusi antar pegawai, kerja kelompok, dan bertukar pikiran mengenai pengalaman pegawai dalam penggunaan SIPD sehingga komunikasi dan hubungan antar pegawai akan terjalin lebih erat. Kegiatan ini mempunyai manfaat untuk membantu menyamakan pemahaman teknis pegawai serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih kompak, sehingga permasalahan teknis maupun administratif dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif.

2. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo segera untuk menyusun dan menerapkan SOP yang jelas. SOP yang disusun diharapkan menjadi pedoman kerja bagi pegawai dalam meningkatkan ketelitian, konsistensi, serta efisiensi pegawai dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan sehingga risiko selisih saldo dapat diminimalisir dengan baik.
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo dapat menambah tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang administrasi keuangan sehingga mampu mendukung tugas bendahara penerimaan. Dengan adanya penambahan personil, beban kerja dari bendahara penerimaan bisa lebih seimbang, proses pencatatan dan pelaporan harian tetap dapat berlangsung optimal meskipun terjadi permasalahan selisih saldo pada sistem SIPD. Penambahan tenaga kerja ini, diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih tertib, mendorong kedisiplinan pegawai, serta meningkatkan ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi keuangan.
4. Proses rekonsiliasi data antara pihak bendahara penerimaan dan pihak akuntansi dilakukan lebih awal, tidak harus menunggu akhir bulan. Sebagai langkah antisipatif, rekonsiliasi data dapat dijadwalkan dua kali dalam sebulan. Melalui frekuensi rekonsiliasi yang tinggi, potensi permasalahan dapat terdeteksi lebih cepat sehingga proses penanganan permasalahan lebih efisien dan tidak menumpuk di akhir periode pelaporan.

4.3 Keterbatasan

Dalam Penelitian tidak terlepas dari berbagai bentuk keterbatasan yang ditemui oleh penulis, antara lain:

1. Dikarenakan tingginya beban kerja pegawai, fleksibilitas pelaksanaan wawancara menjadi terbatas oleh waktu.
2. Tidak bisa melakukan wawancara dengan pihak Kementerian Dalam Negeri selaku pengembang SIPD. Hal ini mengakibatkan peneliti kurang dapat menggali lebih dalam informasi dari perspektif Kemendagri mengenai kebijakan dan strategi mitigasi risiko.

3. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan golongan sistem baru dalam pemerintahan, sehingga kajian teoritis atau penelitian yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini masih terbatas.

4.4 Rekomendasi Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo mengenai Evaluasi Strategi Mitigasi Risiko Selisih Saldo Pada Sistem SIPD, maka saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya antara lain:

1. Pada penelitian selanjutnya, dapat ditentukan sampel yang lebih luas cakupannya termasuk dari perspektif pihak Kemendagri, untuk mendukung analisis data yang lebih mendalam dan lengkap.
2. Pada penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan pendekatan penelitian dan penggunaan teknik analisis data dengan lebih luas untuk memberikan solusi mitigasi risiko pada permasalahan di SIPD.
3. Peneliti dapat memperluas dan memperdalam kajian teori yang digunakan untuk memperkuat dasar teori serta menentukan model penelitian lain yang sesuai.

DAFTAR ISI

Jurnal Ilmiah (Akademik)

- Alfani, D., & Nasution, J. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4036–4043.
- Andi Kusnadi, Fahmi Oemar, & Bambang Supeno. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Sains Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 51–63. <https://doi.org/10.55356/sak.v1i1.10>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- As Sajjad, M. B., Kalista, S. D., Zidan, M., & Christian, J. (2020). Analisis Manajemen Risiko Bisnis. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 18(1), 51. <https://doi.org/10.19184/jauj.v18i1.18123>
- Fitriyani, N., Dunakhir, S., & Afiah, N. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Asset Daerah (BKAD) Kabupaten Enrekang. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(4), 410–426. <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.151>
- Harisdayanti, D., Fauzi, R., & Mulyana, R. (2020). Perancangan Manajemen Risiko Operasional Pada Spbe/E-Gov Berdasarkan Permen Panrb Nomor 5 Tahun 2020: Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Bandung Operational Risk Management Design on E-Gov/Spbe Based on Permen Panrb Nomor 5 Tahun 2020: Case Study Government. 7(2), 7348–7353.
- Haryono, E. (2023). Metodologi penelitian kualitatif di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. *E-Journal an-Nuur: The Journal of Islamic Studies*, 13, 1–6.
- Indriani, R., & Siswantoro, D. (2023). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Satuan Kerja X. *Owner*, 7(4), 3006–3017. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1656>
- Kapoh, L. E. C., Rotindulu, D. C., & Maramis, M. T. B. (2020). *Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado*. 20(03), 88–98.
- Kelana. (2024). *Manajemen Aplikasi SIPD di Inspektorat Provinsi Riau dalam Perspektif George R. Terry*. 1–23.
- Kumalasari, N. I., & Fanida, E. H. (2024). 60747-Article Text-136176-5-10-20240618. *Publika*, 12(2), 381–394.
- Kuncoro, A. R. (2021). Kepatuhan Pajak Dan Reputasi Perusahaan. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 186–191. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1415>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Muhammad Asir, Yuniawati, R. A., Mere, K., Sukardi, K., & Anwar, M. A. (2023).

- Peran manajemen risiko dalam meningkatkan kinerja perusahaan: studi manajemen sumber daya manusia. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)*, 4(1), 32–42. <https://doi.org/10.37631/ebisma.v4i1.844>
- Naconha, A. E. (2021).
- Pamungkas, G., Puri, P. A., & Yanto, D. (2023). Pengaruh Audit Internal dan Akuntabilitas Sektor Publik terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan dalam Mengelola Alokasi Dana Desa di Kecamatan Pontang Tahun 2022. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 3521–3533. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.5149>
- Pebriani, R. A. (2019). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyuwangi dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 10(1), 55–62. <https://doi.org/10.36982/jiegm.v10i1.744>
- Resdiana, E. (2021). Efektifitas Standard Operating Procedures (Sop) Dalam Pelayanan Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 93–108. <https://doi.org/10.28944/masyrif.v2i2.517>
- Riani, R., & Jumhur, H. M. (2020). Implementation of risk management in the ministry of finance according to decree the minister of finance no . 577. *E-Procending of Management*, 7(2), 2204–2213.
- Romdona, S. (2023). *Teknik Pengumpulan Data*. 3(1), 39–47.
- Sari, R. P., Mulyani, C. S., & Budiarto, D. S. (2020). Pentingnya Pengendalian Internal Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.26486/jramb.v6i1.697>
- Sijabat, J., Judika, M., Siringoringo, B., Findy, G., & Simanjuntak, R. (2024). *Penerapan Sipd (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Dprd Kota*. 9(1), 1169–1183.
- Sine, M. M., & Maria, E. (2022). Analisis Manajemen Risiko pada Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Menggunakan IEC/ISO 31010:2019. *Building of Informatics, Technology and Science (BITS)*, 4(1). <https://doi.org/10.47065/bits.v4i1.1531>
- Siregar, Y. S., Darwis, M., Baroroh, R., & Andriyani, W. (2022). Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik dengan Menggunakan Media Pembelajaran yang Menarik pada Masa Pandemi Covid 19 di SD Swasta HKBP 1 Padang Sidempuan. *Jurnal Ilmiah Kampus Mengajar*, 2, 69–75. <https://doi.org/10.56972/jikm.v2i1.33>
- Sudarmanto Eko. (2020). Manajemen Risiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(2), 107–121.
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Syahrani, M. (2020). Membangun Kepercayaan Data dalam Penelitian Kualitatif. *Primary Education Journal (Pej)*, 4(2), 19–23. <https://doi.org/10.30631/pej.v4i2.72>

- Vitriana, N., Agustawan, A., & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *Digital Business Journal*, 1(1), 64. <https://doi.org/10.31000/digibis.v1i1.6947>
- Warahmah, M., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Pendekatan Dan Tahapan Penelitian Dalam Kajian Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal DZURRIYAT Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(2), 72–81. <https://doi.org/10.61104/jd.v1i2.32>
- Wulandari, A. D., & Yuliati, A. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jember). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (Costing)*, 7(1), 637–649. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.6217>
- Yalabi, D. A. (2021). Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Components of Local Government Financial Reports. *Pitis AKP*, 1–7.
- Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>
- Yusri, A. Z. dan D. (2020). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) Di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 809-820 <http://eprints.ipdn.ac.id/14976/1/Muhammad>.

Buku Ajar

- Adil, A. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik* (Issue January).
- Luthfiyah, M. F. (2019). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. November, 26.
- Spradley, P., & Huberman, M. (2024). *Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*

Laporan Penelitian/Skripsi/Tugas Akhir

- Alwie, rahayu deny danar dan alvi furwanti, Prasetio, A. B., Andespa, R., Lhokseumawe, P. N., & Pengantar, K. (2020). Tugas Akhir Tugas Akhir. *Jurnal Ekonomi Volume 18, Nomor 1 Maret201*, 2(1), 41–49.
- Analkhis, A. B. V. (2021). Ta: Tinjauan Manajemen Risiko Pra Konstruksi, Pelaksanaan Konstruksi, Dan Pasca Kontruksi Pada Proyek Pembangunan Gedung Student Center Politeknik Negeri IndramanArifin, Moch.yu. *Institut Teknologi Nasional-Bandung*, 1–9.
- Pradipta, R. S. (2023). Efektivitas Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (Rka) Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd). *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 1–12. <http://eprints.ipdn.ac.id/15182/%0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/15182/3/Risma>
Siswi Pradipta %2830.0843%29 - Efektivitas Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

- Ummah, M. S. (2019). Analisis Kinerja Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Cilacap.. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. Sistem Pembentukan Terpusat Strategi Melestari.
- Wahyuningsih, D. T. (2022). *Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah (Bppkad) Kabupaten Wonosobo*. 4(1).

Prosiding/Seminar

- Ahmad, F. M. (2019). Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. *Industrial Research Workshop and National Seminar*, 1182–1192.
- Analkhis, A. B. V. (2021). Ta: Tinjauan Manajemen Risiko Pra Konstruksi, Pelaksanaan Konstruksi, Dan Pasca Kontruksi Pada Proyek Pembangunan Gedung Student Center Politeknik Negeri Indraman Arifin, Moch.yu. *Institut Teknologi Nasional-Bandung*, 1–9.
- Ekaputra, N. D. (2021). *Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk*. 75(17), 399–405.

Artikel

- Inofi, D. I. K. (2023). *645-Article Text-1135-1-10-20230922*. 4(2), 1410–1417.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Instrumen Penelitian

DRAFT WAWANCARA KEPALA BKAD KABUPATEN KULON PROGO EVALUASI PENERAPAN STRATEGI MITIGASI RISIKO SELISIH SALDO PADA SISTEM SIPD DI BKAD KABUPATEN KULON PROGO

Hari/Tanggal :

Durasi waktu wawancara :

Narasumber :

1. Upaya Manajemen Risiko
 - a. Apakah BKAD Kabupaten Kulon Progo telah menerapkan manajemen risiko untuk menangani permasalahan yang muncul di SIPD ?
 - b. Bagaimana proses mitigasi risiko yang sudah terjadi di BKAD Kabupaten Kulon Progo untuk mengatasi permasalahan di SIPD ?
 - c. Seberapa sering anda melakukan pemantauan terhadap proses penyusunan laporan keuangan ?

DRAFT WAWANCARA BENDAHARA PENERIMAAN EVALUASI PENERAPAN STRATEGI MITIGASI RISIKO SELISIH SALDO PADA SISTEM SIPD DI BKAD KABUPATEN KULON PROGO

Hari/Tanggal :

Durasi waktu wawancara :

Narasumber :

1. Faktor Penyebab Selisih Saldo (kurang pemahaman pegawai terhadap sistem)
 - a. Menurut anda, apa yang menjadi penyebab kurangnya pemahaman pegawai dalam proses penginputan data pada SIPD ?
 - b. Apakah pelatihan dan sosialisasi yang diberikan oleh pihak Kemendagri sudah memadai ?
 - c. Apakah prosedur penginputan data pada SIPD sudah jelas dan mudah dipahami ?
2. Proses Manajemen Risiko pada BKAD Kabupaten Kulon Progo

- a. Bagaimana peran bendahara penerimaan dalam mendukung proses identifikasi dan pengelolaan risiko yang berkaitan dengan penggunaan SIPD, khususnya dalam hal pencatatan dan pelaporan penerimaan daerah ?
 - b. Apa langkah konkret yang dilakukan oleh bendahara penerimaan untuk mempermudah proses rekonsiliasi data ?
 - c. Bagaimana proses rekonsiliasi data antara pihak bendahara penerimaan dengan pihak terkait ?
3. Evaluasi Penerapan Mitigasi Risiko
- a. Apakah proses mitigasi risiko berupa rekonsiliasi data sudah berjalan dengan baik ?
 - b. Bagaimana pendapat anda mengenai tenggat waktu yang diberikan dan apa saja kendala yang anda alami ?
4. Belum Sempurnanya sistem SIPD
- a. Selain disebabkan *human error*, apakah permasalahan selisih saldo disebabkan karena faktor lain ?
 - b. Dampak apa saja yang ditimbulkan dari permasalahan belum sempurnanya sistem SIPD ?
 - c. Bagaimana koordinasi antara pihak BKAD Kabupaten Kulon Progo dengan pihak Kemendagri apabila terjadi permasalahan ?

DRAFT WAWANCARA BIDANG AKUNTANSI

EVALUASI PENERAPAN STRATEGI MITIGASI RISIKO SELISIH SALDO PADA SISTEM SIPD DI BKAD KABUPATEN KULON PROGO

Hari/Tanggal :

Durasi waktu wawancara :

Narasumber :

1. Faktor Penyebab Selisih Saldo (kurangnya komunikasi)
 - a. Bagaimana proses komunikasi yang terjadi antara pihak akuntansi dengan bendahara penerimaan saat terjadi selisih saldo pada LRA dengan LPJ ?

- b. Apakah Komunikasi yang dilakukan antara pihak akuntansi dengan bendahara penerimaan sudah cukup untuk menyelesaikan permasalahan selisih saldo ?
 - c. Menurut anda, apakah perlu untuk melibatkan pihak lain dalam menyelesaikan permasalahan selisih saldo selain bendahara penerimaan ?
2. Evaluasi Penerapan Mitigasi Risiko
- a. Apakah perbedaan saldo masih terjadi setelah diberlakukan mitigasi risiko oleh Kepala BKAD ?
 - b. Apakah mitigasi risiko berupa proses rekonsiliasi data sudah berjalan dengan baik dan langkah apa yang dilakukan pihak akuntansi setelah data tersebut di rekonsiliasi ?
3. Belum Sempurnanya Sistem
- a. Menurut anda, apakah kesalahan penginputan data dari bendahara penerimaan menjadi penyebab utama terjadinya permasalahan selisih saldo ?
 - b. Dampak apa yang terjadi apabila permasalahan tersebut terjadi ?

DRAFT WAWANCARA SUBBIDANG EVALUASI DAN PENGENDALIAN PENDAPATAN

EVALUASI PENERAPAN STRATEGI MITIGASI RISIKO SELISIH SALDO PADA SISTEM SIPD DI BKAD KABUPATEN KULON PROGO

Hari/Tanggal :

Durasi waktu wawancara :

Narasumber :

- 1. Faktor Penyebab Selisih Saldo (kurangnya komunikasi)
 - a. Biasanya kapan diadakan rapat koordinasi antar bidang di BKAD Kabupaten Kulon Progo ?
- 2. Penerapan Manajemen Risiko dan Evaluasi Strategi Mitigasi Risiko
 - a. Menurut anda, bagaimana proses manajemen risiko serta mitigasi risiko yang sudah diterapkan oleh Kepala BKAD Kabupaten Kulon Progo ?

- b. Apakah melalui koordinasi antar pihak terkait permasalahan yang terjadi bisa langsung menemukan solusi permasalahannya ?

DRAFT WAWANCARA PIHAK VERIFIKASI DATA

EVALUASI PENERAPAN STRATEGI MITIGASI RISIKO SELISIH SALDO PADA SISTEM SIPD DI BKAD KABUPATEN KULON PROGO

Hari/Tanggal :

Durasi waktu wawancara :

Narasumber :

1. Faktor Penyebab Selisih Saldo (kurang cermatnya pegawai)
 - a. Bagaimana alur proses dalam melakukan verifikasi data pada sistem SIPD ?
 - b. Apakah anda setiap hari melakukan proses verifikasi data ?
 - c. Apakah pada SIPD tersedia fitur untuk membantu pekerjaan anda untuk mempercepat proses *verifikasi* data ?
2. Faktor Penyebab Selisih saldo (Belum adanya SOP dari pihak BKAD Kabupaten Kulon Progo)
 - a. Apakah dalam melakukan pemrosesan data terdapat panduan atau SOP yang diterbitkan oleh pihak Kemendagri ?
 - b. Apakah ada sanksi apabila melakukan keterlambatan dalam pemrosesan data verifikasi?

DRAFT WAWANCARA PIHAK MAHASISWA MAGANG SUBBAGIAN KEUANGAN

EVALUASI PENERAPAN STRATEGI MITIGASI RISIKO SELISIH SALDO PADA SISTEM SIPD DI BKAD KABUPATEN KULON PROGO

Hari/Tanggal :

Durasi waktu wawancara :

Narasumber :

1. Faktor Penyebab Selisih Saldo (kurang pemahaman pegawai terhadap sistem)

- a. Apakah sebelum anda diberikan tugas untuk melakukan penginputan data ada pelatihan mengenai sistem tersebut?
- b. Apakah ada pengawasan selama anda melakukan penginputan data di SIPD? Kemudian dampak apa yang dihasilkan, apabila anda melakukan kesalahan input data ?

HASIL WAWANCARA I (JANUARI 2025)

Hari/Tanggal : Jum'at, 31 Januari 2025

Durasi waktu wawancara : 15 Menit

Narasumber : Bendahara Penerimaan

1. Menurut anda, apa yang menjadi penyebab kurangnya pemahaman pegawai dalam proses penginputan data pada SIPD ?

Menurut pengamatan yang saya lakukan semenjak SIPD mulai digunakan, salah satu penyebab terjadinya selisih saldo berasal dari pegawai yang kurang memahami proses penginputan data yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti kurangnya pelatihan yang memadai menyebabkan pegawai kesulitan dalam mengoperasikan sistem SIPD dan kurangnya pemahaman mengenai fitur-fitur yang ada di dalamnya. Selain itu, pekerjaan penginputan data pada SIPD sering diberikan kepada anak magang dikarenakan banyaknya beban pekerjaan yang ditanggung. Oleh karena itu, pegawai menjadi kurang memahami fitur-fitur yang ada pada SIPD.

2. Apakah pelatihan dan sosialisasi yang diberikan oleh pihak Kemendagri sudah memadai ?

Pelatihan dan panduan yang diberikan oleh Pihak Kemendagri kurang memadai, bahkan pihak Kemendagri belum pernah mengadakan sosialisasi atau pelatihan mengenai penggunaan sistem SIPD. Selain itu, pihak BKAD sendiri belum pernah melakukan pelatihan maupun sosialisasi terkait SIPD.

3. Apakah prosedur penginputan data pada SIPD sudah jelas dan mudah dipahami ?

Prosedur mengenai penginputan data sedikit rumit untuk dipahami karena ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan serta fitur-fitur yang ada di dalam sistem SIPD rumit apabila tidak terbiasa.

Hari/Tanggal : Jum'at, 31 Januari 2025

Durasi waktu wawancara : 20 Menit

Narasumber : Bendahara Penerimaan

1. Selain disebabkan *human error*, apakah permasalahan selisih saldo disebabkan karena faktor lain ?

Selain dari permasalahan yang disebabkan karena human error, kami juga menghadapi permasalahan yang bersumber dari sistem nya sendiri.

Permasalahan ini seperti, lambatnya respon sistem saat jam kerja sibuk, keterbatasan adanya fitur untuk mengoreksi data yang sudah diinput, serta biasanya ada pembaharuan atau perubahan kebijakan beberapa akun pendapatan secara mendadak dari pusat dan belum diikuti dengan panduan teknis yang jelas sehingga kadang menyebabkan double entry.

2. Dampak apa saja yang ditimbulkan dari permasalahan belum sempurnanya sistem SIPD ?

Kalau di BKAD Kabupaten Kulon Progo sendiri, permasalahan dari sistem yang sangat berdampak pada terjadinya selisih saldo adalah adanya kebijakan perarturan sistem contra pos pada beberapa jenis akun pendapatan sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya permasalahan selisih saldo karena adanya double entry otomatis karena sistem.

3. Bagaimana koordinasi antara pihak BKAD Kabupaten Kulon Progo dengan pihak Kemendagri apabila terjadi permasalahan ?

Biasanya kami akan melaporkan permasalahan ini melalui grup koordinasi bersama Kemendagri atau kami menghubungi pihak Kemendagri melalui Call Center yang tertera di SIPD.

Hari/Tanggal : Jum'at, 31 Januari 2025
 Durasi waktu wawancara : 5 Menit
 Narasumber : Kepala Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan

1. Biasanya kapan diadakan rapat koordinasi antar bidang di BKAD Kabupaten Kulon Progo ?

Biasanya, rapat koordinasi kami adakan setiap satu bulan sekali untuk mengevaluasi seluruh kegiatan dan permasalahan yang terjadi di setiap bidang disini. Melalui rapat tersebut, harapannya setiap bidang bisa menyampaikan kendala yang dihadapi, sehingga solusi dapat kita temukan secara bersama-sama.

HASIL WAWANCARA II (FEBRUARI 2025)

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Februari 2025
 Durasi waktu wawancara : 20 Menit
 Narasumber : Pihak Verifikasi Data

1. Bagaimana alur proses dalam melakukan verifikasi data pada sistem SIPD ?
Alur Proses Verifikasi, saya lakukan setelah data dari satu transaksi penerimaan daerah selesai dibuat oleh bendahara penerimaan. Data yang dimaksud disini adalah Surat Tanda Bukti Penerimaan (STBP). Setelah bendahara penerimaan membuat STBP untuk setiap transaksi penerimaan, saya kemudian melakukan proses verifikasi terhadap data tersebut.

2. Apakah anda setiap hari melakukan proses verifikasi data ?

Verifikasi data ini biasanya saya lakukan pada saat bendahara penerimaan akan menyusun Surat Tanda Setoran (STS).

3. Apakah pada SIPD tersedia fitur untuk membantu pekerjaan anda untuk mempercepat proses verifikasi data ?

Dalam sistem SIPD, terdapat juga fitur yang memudahkan pekerjaan saya yaitu verifikasi massal yang memungkinkan pengguna untuk melakukan verifikasi banyak data sekaligus. Fitur ini sangat membantu saya dalam mempercepat proses kerja, mengingat jumlah data yang akan saya verifikasi lumayan banyak ditambah apabila data yang belum diverifikasi menumpuk saya akan kewalahan dalam melakukan pemrosesan data . Oleh karena itu, saya sering memanfaatkan fitur ini agar data dapat segera diproses ke tahap selanjutnya.

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Februari 2025

Durasi waktu wawancara : 10 Menit

Narasumber : Pihak Verifikasi Data

1. Apakah dalam melakukan pemrosesan data terdapat panduan atau SOP yang diterbitkan oleh pihak Kemendagri ?

Pada sistem SIPD memang sudah tersedia panduan untuk pemrosesan data, namun di BKAD Kabupaten Kulon Progo belum terdapat SOP yang jelas terkait pelaksanaan pekerjaan ini. Tidak ada aturan resmi mengenai batas waktu penyelesaian pemrosesan data, misalnya kewajiban menyelesaikan dalam satu hari. Oleh karena itu, dalam praktiknya saya biasanya menunggu permintaan dari bendahara penerimaan untuk melakukan verifikasi data, sementara itu saya mengerjakan tugas lain terlebih dahulu.

2. Apakah ada sanksi apabila melakukan keterlambatan dalam pemrosesan data verifikasi?

Hingga saat ini, belum terdapat sanksi yang diberikan oleh BKAD Kabupaten Kulon Progo maupun Kemendagri terhadap keterlambatan dalam pelaksanaan proses verifikasi data.

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Februari 2025

Durasi waktu wawancara : 15 Menit

Narasumber : Staf Bidang Akuntansi

1. Menurut anda, apakah kesalahan penginputan data dari bendahara penerimaan menjadi penyebab utama terjadinya permasalahan selisih saldo ?

Menurut saya, permasalahan selisih saldo ini juga tidak sepenuhnya berasal dari kesalahan penginputan dari pihak bendahara penerimaan. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya, apabila bendahara penerimaan melakukan pencatatan penerimaan pajak daerah saat sistem sedang sibuk, meskipun data tersebut sudah tercatat pada LPJ bendahara penerimaan, data tersebut belum tercatat pada LRA di bidang kami.

2. Dampak apa yang terjadi apabila permasalahan tersebut terjadi ?

Dari permasalahan tersebut, akan berdampak adanya selisih saldo antara LPJ dan LRA, sehingga perlu dilakukan rekonsiliasi data untuk menemukan jenis akun yang bermasalah.

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Februari 2025

Durasi waktu wawancara : 20 Menit

Narasumber : Staf Bidang Akuntansi

1. Bagaimana proses komunikasi yang terjadi antara pihak akuntansi dengan bendahara penerimaan saat terjadi selisih saldo pada LRA dengan LPJ ?

Komunikasi yang saya lakukan dengan bendahara penerimaan biasanya dilakukan ketika selisih saldo terdeteksi, biasanya saat saya memeriksa data akhir bulan. Jika ada masalah, saya akan langsung mendatangi bendahara penerimaan untuk mengkonfirmasi dan mencari tahu bersama sumber permasalahan tersebut.

2. Apakah Komunikasi yang dilakukan antara pihak akuntansi dengan bendahara penerimaan sudah cukup untuk menyelesaikan permasalahan selisih saldo ?

Komunikasi antara saya dan bendahara penerimaan merupakan salah satu refleksi saya apabila saya menemukan adanya perbedaan saldo. Saya

melakukan komunikasi langsung dengan Bendahara Penerimaan karena saya merasa yang paling banyak berkaitan dengan pekerjaan saya adalah Bendahara Penerimaan. Tetapi, komunikasi tersebut tidak akan menyelesaikan permasalahan apabila permasalahan yang muncul berasal dari beberapa bidang terkait.

3. Menurut anda, apakah perlu untuk melibatkan pihak lain dalam menyelesaikan permasalahan selisih saldo selain bendahara penerimaan ?
Sangat penting untuk melibatkan pihak lain selain bendahara penerimaan, karena proses data melalui berbagai tahapan yang memerlukan bantuan dari pihak-pihak terkait lainnya untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Februari 2025

Durasi waktu wawancara : 25 Menit

Narasumber : Kepala BKAD Kabupaten Kulon Progo

1. Apakah BKAD Kabupaten Kulon Progo telah menerapkan manajemen risiko untuk menangani permasalahan yang muncul di SIPD ?

Menurut saya, BKAD Kabupaten Kulon Progo telah melakukan penerapan manajemen risiko dengan langkah awal mengidentifikasi potensi permasalahan yang muncul dari penggunaan sistem SIPD.

2. Bagaimana proses mitigasi risiko yang sudah terjadi di BKAD Kabupaten Kulon Progo untuk mengatasi permasalahan di SIPD ?

Langkah nyata yang sudah dilakukan oleh kami yaitu, adanya rekonsiliasi data keuangan selama periode waktu sebulan serta saya selaku kepala BKAD menjembatani antara pihak-pihak yang terkait sehingga koordinasi antar pihak bisa lebih kuat lagi.

3. Seberapa sering anda melakukan pemantauan terhadap proses penyusunan laporan keuangan ?

Pemantauan dan evaluasi risiko ini biasanya saya lakukan secara berkala, khususnya menjelang penyusunan laporan keuangan triwulanan dan akhir tahun. Biasanya dari rapat tersebut, kami bersama-sama akan mengidentifikasi sumber permasalahan dan mencari solusi terbaik dari permasalahan yang terjadi. Saya juga akan menetapkan tenggat waktu

internal yang lebih awal dari batas waktu (deadline) yang diberikan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), guna memastikan laporan keuangan yang disusun lebih akurat dan tepat waktu. Pemantauan dan evaluasi risiko ini biasanya saya lakukan secara berkala, khususnya menjelang penyusunan laporan keuangan triwulanan dan akhir tahun. Biasanya dari rapat tersebut, kami bersama-sama akan mengidentifikasi sumber permasalahan dan mencari solusi terbaik dari permasalahan yang terjadi. Saya juga akan menetapkan tenggat waktu internal yang lebih awal dari batas waktu (deadline) yang diberikan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), guna memastikan laporan keuangan yang disusun lebih akurat dan tepat waktu.

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Februari 2025
 Durasi waktu wawancara : 25 Menit
 Narasumber : Kepala Subbidang Evaluasi dan Pengendalian
 Pendapatan

1. Menurut anda, bagaimana proses manajemen risiko serta mitigasi risiko yang sudah diterapkan oleh Kepala BKAD Kabupaten Kulon Progo ?

Kalau saya lihat secara keseluruhan, proses dalam pelaksanaan strategi mitigasi yang dilakukan oleh Kepala BKAD Kabupaten Kulon Progo sudah berjalan cukup baik. Beliau telah melakukan pemantauan rutin agar laporan keuangan yang nantinya di laporkan oleh BKAD Kabupaten Kulon Progo akurat dan dapat dipercaya. Apabila ditemukan permasalahan, beliau juga langsung tanggap apabila terjadi permasalahan mengenai operasional BKAD dan kami akan berkoordinasi untuk melakukan rapat.

2. Apakah melalui koordinasi antar pihak terkait permasalahan yang terjadi bisa langsung menemukan solusi permasalahannya ?

Belum karena apabila sudah dilakukan rapat koordinasi, masih sering ditemukan perbedaan pendapat untuk mencari jalan tengahnya. Perbedaan tersebut kadang sampai berlarut-larut dan permasalahan yang harusnya selesai malah nambah. Kalau dari pengamatan saya, saya melihat adanya kurangnya komunikasi antar pihak sehingga mereka tetap pada pendapat mereka.

HASIL WAWANCARA III (MARET 2025)

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Maret 2025

Durasi waktu wawancara : 35 Menit

Narasumber : Bendahara Penerimaan

1. Bagaimana peran bendahara penerimaan dalam mendukung proses identifikasi dan pengelolaan risiko yang berkaitan dengan penggunaan SIPD, khususnya dalam hal pencatatan dan pelaporan penerimaan daerah ?

Menurut saya, peran yang paling krusial untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul adalah peran dari bendahara penerimaan. Saya mengatakan demikian karena awal suatu transaksi keuangan terjadi berasal dari saya. Oleh karena itu, saya juga menyusun sendiri kumpulan permasalahan yang muncul dan akan menjadi bahan mitigasi risiko ke depan.

2. Apa langkah konkret yang dilakukan oleh bendahara penerimaan untuk mempermudah proses rekonsiliasi data ?

Langkah nyata yang saya lakukan adalah melakukan pencatatan harian secara disiplin terhadap seluruh transaksi penerimaan. Sehingga dari langkah tersebut, saya beranggapan bahwa akan lebih mudah dalam melakukan rekonsiliasi data. Saya akan melakukan rekonsiliasi data dengan pihak terkait, misalnya adanya selisih dengan pihak akuntansi saya akan melakukan komunikasi.

3. Bagaimana proses rekonsiliasi data antara pihak bendahara penerimaan dengan pihak terkait ?

Saya akan melakukan rekonsiliasi data dan dari hasil rekonsiliasi tersebut, biasanya akan ditemukan sumber permasalahan. Setelah proses rekonsiliasi selesai dilakukan akan dilakukan proses perbaikan data dengan waktu sebelum tenggat waktu yang sudah ditentukan.

4. Apakah proses mitigasi risiko berupa rekonsiliasi data sudah berjalan dengan baik ?

Proses mitigasi berupa rekonsiliasi data dengan pihak terkait sudah berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, walaupun saya sudah melakukan pencatatan data penerimaan secara harian, saya masih memerlukan banyak waktu untuk menemukan sumber permasalahan selisih saldo dan memperbaiki data agar balance.

5. Bagaimana pendapat anda mengenai tenggat waktu yang diberikan dan apa saja kendala yang anda alami ?

Tenggat waktu yang diberikan oleh kepala BKAD sebenarnya memiliki tujuan baik, tetapi saya merasa memerlukan banyak waktu untuk melakukan perbaikan data ditambah lagi proses yang dilalui harus melalui 3 tahapan

dengan melibatkan pihak lain terlebih dahulu sebelum saya melakukan perbaikan. Selain harus melibatkan pihak lain, saya juga memiliki tugas dan tanggung jawab harian untuk melakukan pencatatan harian penerimaan daerah. Kendala yang saya hadapi dalam proses rekonsiliasi dan perbaikan data adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dapat membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab saya. Akibatnya, pekerjaan rutin seperti pencatatan harian menjadi terhambat, bahkan tertunda, karena harus memprioritaskan proses rekonsiliasi dan koreksi data tersebut karena adanya tenggat waktu.

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Maret 2025

Durasi waktu wawancara : 15 Menit

Narasumber : Kepala Bidang Akuntansi

1. Apakah perbedaan saldo masih terjadi setelah diberlakukan mitigasi risiko oleh Kepala BKAD ?

Perbedaan saldo masih kerap terjadi meskipun upaya mitigasi risiko telah diterapkan. Kondisi ini menurut saya umumnya disebabkan oleh kesalahan manusia (human error) dalam proses pengolahan data sehingga permasalahan selisih saldo masih kerap terjadi.

2. Apakah mitigasi risiko berupa proses rekonsiliasi data sudah berjalan dengan baik dan langkah apa yang dilakukan pihak akuntansi setelah data tersebut di rekonsiliasi ?

proses risiko berupa rekonsiliasi data sudah berlangsung cukup baik, biasanya staf kami yang melakukan tugas pemantauan data keuangan akan berkoordinasi dengan bendahara penerimaan. Biasanya kami akan mencocokkan data keuangan tersebut, setelah ditemukan letak perbedaan saldo yang terjadi. Kami nantinya akan melakukan unposting jurnal untuk memperbaiki data yang dibuat oleh bendahara penerimaan.

HASIL WAWANCARA IV (MEI 2025)

Hari/Tanggal : Senin, 12 Mei 2025

Durasi waktu wawancara : 15 Menit

Narasumber : Mahasiswa Magang Subbagian Keuangan

1. Apakah sebelum anda diberikan tugas untuk melakukan penginputan data ada pelatihan mengenai sistem tersebut?

Pada saat saya pertama kali diberikan tugas untuk melakukan penginputan data di SIPD, saya hanya diberikan penjelasan singkat bagaimana pemrosesan data tersebut dilakukan dan langsung diminta mulai menginput data tersebut ke sistem dengan pengawasan. Tidak ada pelatihan yang diberikan terkait dengan fitur-fitur yang ada di dalamnya sehingga saya harus mengeksplorasi sendiri fitur yang ada di dalamnya. Pada awal-awal saya menggunakan sistem tersebut, setelah saya selesai melakukan penginputan nanti bendahara penerimaan akan mengecek pekerjaan saya.

2. Apakah ada pengawasan selama anda melakukan penginputan data di SIPD? Kemudian dampak apa yang dihasilkan, apabila anda melakukan kesalahan input data ?

Pada awal-awal saya menggunakan sistem tersebut, setelah saya selesai melakukan penginputan nanti bendahara penerimaan akan mengecek pekerjaan saya. Kemudian saya pernah melakukan kesalahan penginputan, kesalahan pernah saya lakukan antara lain: salah memasukan nominal, salah memasukan nama akun, dan salah memasukan tanggal transaksi karena sedikit rumit. Dampak dari kesalahan input tersebut menyebabkan terjadinya selisih saldo pada LPJ dan BKU.

LAMPIRAN 2 : Surat Keterangan Riset/Magang



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

ආකෘතිමය ප්‍රවණතා හැසිරීමේදී

Alamat : Jalan Perwakilan Nomor 1, Wates, Kulon Progo

Telp : (0274) 773221, Fax : (0274) 773221

Website : <https://bkad.kulonprogokab.go.id/>, Email : bkad@kulonprogokab.go.id

SURAT KETERANGAN MAGANG

NOMOR: 400.14.5.4/0276

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : TAUFIQ AMRULLAH ST. M.M.
b. NIP : 19700406 199903 1 003
c. Pangkat : Pembina Utama Muda; IV/c
d. Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo

dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : Najla Uzdah Asmahani
b. NIM : 21213018
c. Jurusan : D4 Analisis Keuangan Fakultas Bisnis & Ekonomika

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan magang di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo mulai tanggal 09 September 2024 s.d. 21 Februari 2025. Selama magang di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, yang bersangkutan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo, 21 Februari 2025



TAUFIQ AMRULLAH, S.T., M.M.
NIP. 19700406 199903 1 003

LAMPIRAN 3 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap	: Najla Uzdah Asmahani
Tempat dan tanggal lahir	: Kulon Progo, 18 Maret 2003
Alamat	: Kebondalem, RT/RW 034/011, Desa Kulur, Kecamatan Temon, Kab. Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor telepon	: 0895322666982
E-mail	: najlauzdah4@gmail.com
Riwayat Pendidikan	: SMA Negeri 1 Temon SMP Negeri 1 Temon
Pengalaman Organisasi	: Anggota Kopma UII Magang Bidang Hubineks Kopma UII Pengurus Bidang Hubineks Kopma UII
Pengalaman Kepanitiaan	: Koordinator Humas dan <i>Sponsorship</i> Kovent

LAMPIRAN 4 : Surat Keterangan Hasil Pindai Uji Kemiripan Naskah



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. feet@uii.ac.id
W. fecon.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL TES KEMIRIPAN

No.: 1945/Ka.Div/10/Div.PP/V/2025

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Najla Uzdah Asmahani**
 Nomor Mahasiswa : **21213018**
 Dosen Pembimbing : **Annisa Rahima, SE., M.Ec. Dev.,**
 Program Studi : **Analisis Keuangan**
 Judul Karya Ilmiah : **Evaluasi Penerapan Strategi Mitigasi Risiko Selisih Saldo
 Pada Sistem SIPD di BKAD Kabupaten Kulon Progo**
 Nomor Hp : **0895322666982**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses tes kemiripan (*similarity test*) menggunakan **Turnitin** dengan hasil **2% (dua persen)** sesuai aturan batas minimal dinyatakan lolos yang diberlakukan di Universitas Islam Indonesia yaitu sebesar 20% (dua puluh persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 26 Mei 2025

Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan,



Suswardi S.P., M.IP.

LAMPIRAN 5 : Dokumentasi Kegiatan Wawancara dan Dokumen B9



SETORAN
Model Bend. 17
Rek. B*O Cab. Wates
No.003.111.000.155

2024
Lembar ke
Setoran seperti ini yang terakhir
Telah dilakukan tanggal
Wates, Desember 2024

Daerah Kabupaten Kulon Progo
Daerah Kab. Kulon Progo

Menorima uang sebesar : **Rp.1.200.000,00**
(satu juta dua ratus ribu rupiah)
di handal)
sasaran : Pengisian Barang Dongkaran Tower Internet

No	Ayat	Uraian penerimaan dari	Jumlah	Keterangan
1		Pengisian Barang Dongkaran Tower Internet		
		1. Tower Internet SMP N 1 Glimulyo	Rp. 400.000,00	
		2. Tower Internet SD N Sanggihnan, Wates	Rp. 400.000,00	
		3. Tower Internet SD N 2 Sukomoyo, Glimulyo	Rp. 400.000,00	
		Jumlah	Rp. 1.200.000,00	

Telah dilakukan
Dalam Buku Kas Daerah

Tanggal :
Nomor :

Penyetor
Yucky Windu Aje
(Yucky Windu Aje)

Uang tersebut diatas diterima
Wates, 18 Desember 2024

Penetima
RAHANG PRATIYO
TELLER

